

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI PASAR TENGAH TANJUNG KARANG  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**DESI TAMARA  
NPM: 1521020204**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI PASAR TENGAH TANJUNG KARANG  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H, M.H.

Pembimbing II : Marwin, S.H.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat penegak hukum bagian Peraturan Daerah yang berada dibawah Walikota yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dengan tujuan agar masyarakat menjadi lebih tentram dan juga tertib. Menyelenggarakan ketertiban umum biasanya sering dilakukan dilingkungan para pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan cukup banyak para pedagang kaki lima yang tidak tertib khususnya pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tengah. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Satpol PP dalam menertibkan para pedagang kaki lima di Pasar Tengah di tinjau dalam *fiqh siyasah*. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dibutuhkan, penelitian ini mengumpulkan bahan dari lapangan melalui wawancara sebagai metode pokok, lalu metode observasi dan dokumentasi sebagai metode pendukung penelitian dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini memberikan jawaban bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik. Khususnya dalam menegakkan Perda dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung yang tidak taat aturan. Jika para pedagang kaki lima masih masih tidak mau taat maka Satpol PP akan memberikan sanksi dan menindak mereka dengan cara membawa barang dagangan mereka ke kantor lalu memberikan nasihat kepada para pedagang. Hal ini bertujuan agar para pedagang bisa lebih taat pada aturan yang telah diberlakukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya terdapat cukup banyak faktor penghambat seperti, kurangnya lahan untuk berdagang, pedagang yang tidak mau taat pada aturan, pedagang yang kurang memahami tentang Peraturan Daerah yang berlaku serta biaya sewa toko yang mahal sehingga membuat para pedagang kaki lima enggan untuk pergi mencari tempat berdagang namun Satpol PP sudah berperan sangat baik dalam mengemban tugasnya. Menurut tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung pun sudah sesuai dengan konsep *fiqh siyasah* yaitu lembaga *Wilayatul al-Hisbah*. Dimana tugas lembaga *Wilayatul al-Hisbah* adalah lembaga pengawasan yang bertugas untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran ringan yang salah satunya terjadi di pasar. Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Ali-Imron [3] : 104 yang menjelaskan tentang *amar ma'ruf nahi munkar*.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

---

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Tamara  
NPM : 1521020204  
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

Penulis,

Desi Tamara  
NPM.1521020204





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Tlp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Desi Tamara  
Npm : 1521020204  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul :

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI PASAR TENGAH TANJUNG  
KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunagosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munagosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Haryanto H., M.H.

NIP. 195612051983031002

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197512302003121002

**MENGETAHUI**

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 19711106199803200





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suramin Sukarame / Bandar Lampung Tlp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TENGAH TANJUNG KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG"**. Disusun oleh **Desi Tamara NPM 1521020204**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **12 November 2019**

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua

**Dr. Hj. Zuhraimi, S.H., M.H.**

Sekretaris

**Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

Penguji Utama

**Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.**

Penguji Pendamping I

**Drs. H. Haryanto H, M.H.**

Penguji Pendamping II

**Marwin, S.H., M.H.**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**



**Dr. H. Ashairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil  
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,  
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika  
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu  
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*  
(QS. An-Nisa [4] : 59)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita III, 1982/1983), h.  
68.

## PERSEMBAHAN

Dengan Keridhoan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Rusdi Adironi dan Ibunda (Almh) Neti, dua insan paling kucinta yang selalu mendidik, membimbing dan menyayangiku tanpa ada kata lelah dan putus asa. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Saudara Kandung yang ku sayangi : (Alm) Fauzan Haris, Ira Ria, Nana Ratna, Nita Mayasari dan Nia Kartini, terima kasih kepada kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 06 Desember 1997 anak keenam dari enam bersaudara, anak dari Pasangan Bapak Rusdi Adironi dan (Almh) Ibu Neti.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Tunas Karya Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2003. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Sawah Lama Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2009. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di Bina Mulya Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah ) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2018 telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 30 hari di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) yang penulis beri judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”** shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang insya Allah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh.Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Dr. H. Khairuddin, M.H.
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. yang memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Sekertaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Frenki, M.Si.
5. Pembimbing I Drs. H. Haryanto H, M.H. yang telah memberikan pengarahan dan tidak bosan-bosannya membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.



6. Pembimbing II Marwin, S.H., M.H. yang ikhlas meluangkan waktunya memberikan arahan dan memberikan masukan-masukkan dalam penulisan karya ilmiah ini.
7. Seluruh dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Karyawan Perustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan seluruh pihak akademis yang telah melayani dalam hal administrasi dan lainnya.
9. Segenap guruku di masa TK, SD, SMP dan SMK yang telah mendidik dan mengajar dengan penuh kasih sayang.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Plt. Drs. Sunardi Syamsi, S.E., M. Hum. beserta jajarannya.
11. Sahabat-sahabatku 3DCM (Devvy, Dini, Cucu dan Marlina) yang telah memberikan motivasi, semangat dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku RGS Traveller, Rama, Hendri, Putu, Dini, Muda, Naufal, Qirom, Ade, Bambang dan Rio yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku Wanita-Wanita Ceria, Muvita, Alfhi, Diah, Inas, Beby, dan Kartika yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, membantu, dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Siyasah D 2015 yang telah banyak memberikan warna dalam kehidupan selama perkuliahan dan memberikan semangat.

15. Teman-teman KKN 2015, Septi, Tias, Dzaki, Habib, Elsa, Cici, Avisi, Reihana, Yuni, Sundari, Dimas dan Arif yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah kalian berikan akan mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya dalam bidang khasanah Siyasah.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	16
1. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
a. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
b. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
c. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	20
d. Pengertian Ulil Amri.....	23

e. Tugas Ulil AMri dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	28
f. Kaidah-Kaidah Pemerintahan Dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	42
g. Lembaga Al-Hisbah .....	45
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung .....	50
a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja .....	50
b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja .....	52
c. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja .....	54
3. Pedagang Kaki Lima .....	55
a. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	55
b. Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Pedagang Kaki Lima ....	57
c. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima .....	59
B. Tinjauan Pustaka .....	60
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung .....	63
B. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima .....	70
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung .....	83
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Kota Bandar Lampung .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Rekomendasi .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran yang dapat minyiaratkan maksud atau isi dari karya ilmiah. Untuk lebih memperjelas lagi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”**. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami maksud serta tujuan maka perlu dilakukan penegasan judul. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang di dapat setelah meyelidiki, mempelajari, dan sebagai tinjauannya tepat, benar dengan dugaannya semula.<sup>1</sup> Tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup>

Fiqh siyasah berasal dari kata *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al-Quran dan Al-Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya

---

<sup>1</sup>Petter Salim, Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Englis Press), h. 1621.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

dengan dalil secara rinci.<sup>3</sup> Kata *Siyasah* sendiri berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus *al-‘arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat keijaksanaan. Fiqh siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa definisi fiqh siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudorotan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.<sup>4</sup>

Tinjauan fiqh siyasah disini akan mengkaji dan membahas mengenai ketentuan hukum ketatanegaraan islam perihal peran dan pelaksanaan tugas serta wewenang satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan menghindari adanya kemudorotan.

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pemain sandiwara atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat.<sup>5</sup> Jadi peran yang dimaksud penulis disini adalah mengharapkam agar tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan dalam *fiqh siyasah*.

---

<sup>3</sup> Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1998), h.43

<sup>4</sup> J.Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah:Ajaran Sejarah Dan Pemikiran J.Sayuti Pulungan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.22 dan 24

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.*, h. 1051

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan sebutan Satpol PP dan Linmas merupakan satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.<sup>6</sup>

Menertibkan adalah mengatur; merapikan dan sebagainya; menjadikan tertib.<sup>7</sup> Pada pembahasan ini yang dimaksud menertibkan adalah mengatur atau merapikan pedagang kaki lima supaya tidak berjualan disembarang tempat, termasuk berjualan di fasilitas umum yang memang dilarang oleh pemerintah untuk berjualan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan juga bangunan milik pemerintah ataupun swasta yang sifatnya sementara/tidak menetap.<sup>8</sup>

Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung berada di tengah kota atau pusat kota Bandar Lampung. Terletak di kawasan Jalan Pemuda sampai Jalan Pangkal Pinang. Pasar Tengah merupakan kawasan perdagangan grosir terbesar di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Berdasarkan pada penegasan kalimat diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar

---

<sup>6</sup>Pasal 1 Ayat (5), Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional...., h. 987.

<sup>8</sup>Pasal 1 Ayat (24), Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum



Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung” adalah penulis akan mengkaji atau menelaah mengenai peran, tugas dan wewenang pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penertiban PKL yang dilakukan atau dibebankan kepada satuan polisi pamong praja. Hal ini akan ditinjau melalui tinjauan fiqh siyasah, karena tugas sat pol pp termasuk dalam prinsip-prinsip pemerintahan dalam fiqh siyasah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Berdasarkan fakta yang terjadi di Pasar Tengah banyak terdapat PKL yang tidak dapat ditertibkan sehingga mengakibatkan lahan parkir dan hak pejalan kaki menjadi berkurang, disini peran satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan fungsi penegakkan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mempunyai peran yang sangat penting dalam menertibkan PKL.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan PKL.
- b. Tersedianya literatur juga sarana yang bisa mendukung penelitian dalam rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam segala aspek bahkan aspek sosial maupun politik yang baik, sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat mengakibatkan kemudharatan. Dalam segi politik dan ketatanegaraan sering kali disebut dengan siyasah, yang mana didalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, mengenai *dusturiyah*, *maliyah*, dan *dauliyah*.

Dalam QS. An-Nisa (4):59



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya,”<sup>9</sup>

Maksud dari ulil amri dalam ayat tersebut yaitu, pemegang kekuasaan seperti para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh ulil amri wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat dan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.87.

mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.<sup>10</sup>

Dalam kitab tafsir Al-Maraghi surah An-Nisa ayat 59 ini menafsirkan bahwa manusia harus taat kepada Allah dan amalkanlah kitab-Nya, kemudian juga taatlah kepada Rasul sebab beliau menerangkan bagi manusia apa-apa yang diturunkan pada mereka. *Sunnatu 'I-Lah* telah menyampaikan syari'at Allah kepada mereka, dan juga kita wajib untuk menaati mereka.

Kemudian taatlah juga pada *ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali bagi manusia dalam kebutuhan juga kemaslahatan umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasulullah yang mutawatir. Di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Apabila *Ahlu 'l-Halli wa 'l-Aqdi* dari kaum mu'minin telah ber-*ijma'* (sepakat) atas suatu urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada *nash*-nya dari Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak dipaksa, maka menaatinya adalah wajib.<sup>11</sup>

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung khususnya untuk menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41.

<sup>11</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986), h. 119.



Pamong Praja merupakan satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan fungsi penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung dan menjaga ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung.

Pasar Tengah merupakan pusat perdagangan grosir yang berada di kawasan jalan Pemuda dan Pangkal Pinang di Kota Bandar Lampung. Pasar Tengah sebagai pusat perdagangan di Kota Bandar Lampung menjadikan tempat ini selalu ramai dan tidak pernah sepi pembeli baik yang berjualan dalam toko dan ruko ataupun pedagang kaki lima. Banyaknya PKL di sebabkan karena modal yang dibutuhkan relatif lebih kecil dan berada dikawasan yang strategis.

PKL sudah menjadi ciri khas dari Pasar Tengah, sangat mudah menemukan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tengah. Akan tetapi, di kawasan Pasar Tengah terdapat beberapa kawasan yang menjadi larangan bagi PKL untuk berjualan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pasal 32 ayat (1) *“Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan, jalur hijau, taman, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh walikota”*.

Faktanya di kawasan Pasar Tengah masih banyak dijumpai pedagang kaki lima menjadikan ruang publik untuk tempat berjualan. Para PKL menjadikan tempat parkir, halaman toko dan tempat umum untuk berjualan, sehingga menjadikan kawasan Pasar Tengah tersebut menjadi padat dan tidak nyaman untuk pejalan kaki karena sering menyebabkan kepadatan dan kemacetan angkutan kota dan kendaraan pribadi.

PKL adalah sebagai salah satu usaha masyarakat di bidang perdagangan perlu dikendalikan supaya ketertiban, kebersihan, ketentraman dan keindahan kota Bandar Lampung terjaga. Untuk menjadikan Kota Bandar Lampung yang tertib, bersih, tentram dan indah diperlukan adanya pengendalian para PKL oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Dapat kita lihat berdasarkan uraian diatas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi untuk penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. PKL yang menyalahi aturan untuk tidak berjualan di daerah yang dilarang sudah diberikan peringatan dan penertiban. Guna untuk menghindari bertambah banyaknya PKL di daerah Kota Bandar Lampung terutama kawasan Pasar Tengah yang menjadi pusat perdagangan di Kota Bandar Lampung. Untuk itulah penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.**

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dilakukan supaya pembahasan mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada : Peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar tengah tanjung karang kota bandar lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah?

#### **F. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran satuan polisi pamong praja telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dalam menertibkan PKL di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah.



## G. Signifikansi Penelitian

- a. Signifikansi atau manfaat secara teoritis yaitu merupakan sumbangan ilmu pengetahuan pada para pembaca untuk bisa mengetahui permasalahan yang ada dalam *fiqh siyasah* terhadap undang-undang maupun peraturan pemerintah.
- b. Manfaat praktisnya yaitu untuk bisa memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>12</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan pada kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>13</sup>
- b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskripsi analisis, yaitu merupakan penelitian yang menuturkan juga menguraikan data yang telah ada, kemudian dapat memperoleh kesimpulan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

## 2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari berbagai responden ataupun objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>15</sup> Sumber data yang langsung memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada responden yang terdiri dari anggota-anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung serta dari pihak yang bersangkutan yaitu pedagang kaki lima di Pasar Tengah.

b. Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri.<sup>16</sup> Pengumpulan data sekunder ini bisa dilakukan melalui kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

## 3. Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian pengelolaan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima menggunakan metode;

### a. Observasi

Merupakan metode pada saat pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan juga sistematis.<sup>17</sup> Dalam

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 13.

<sup>16</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandang: Sinar Baru 1991), h. 132.

<sup>17</sup> Soeratno, Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h. 70

penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Teknik pada saat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepala satuan polisi pamong praja Kota Bandar Lampung bagian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta para pedagang kaki lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>19</sup>

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan kemudian untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 107

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013, h. 198

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 117.



## b. Sampel

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel suatu populasi. Dengan demikian teknik sampling merupakan cara yang dilakukan untuk menentukan dan menetapkan sampel yang ditentukan berdasarkan populasi yang ada. Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah *Random Sampling*, yang mana dalam menentukan sampel diambil secara acak. Teknik ini dianggap relevan karena anggota satuan polisi pamong praja dan PKL yang ada di pasar tengah tanjung karang Kota Bandar Lampung tidak mungkin bisa melakukan pengumpulan data secara teratur.

Untuk menentukan seberapa besar jumlah sampel yang akan diambil, maka menurut Suharsimi Arikunto “Subjek yang kurang dari 100 sebaiknya diambil seluruhnya, apabila subjek lebih dari 100 maka subjeknya bisa diambil 10-15% atau 20-25% sesuai dengan kemampuan dari si peneliti.”<sup>21</sup> Dengan demikian peneliti mengambil sampel dari populasi yang ada sebanyak 10% yang meliputi 3 anggota satuan polisi pamong praja yaitu sekretaris dan dua anggota bagian Divisi Tibum (ketertiban umum) serta 10 PKL yang ada di pasar tengah sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.92.

## 5. Pengolahan Data

Setelah penulis mendapatkan data dari penelitian di lapangan, kemudian data yang telah didapatkan tersebut diolah melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. *Edditing*, yaitu meneliti atau memeriksa data yang sudah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. Rekonstruksi data (*recontructioning*). Yaitu menyusun ulang kembali data yang sudah didapat secara teratur, logis, berurutan sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistemasi data (*systemaitizing*), yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahan yang berdasarkan dengan urutan masalah.<sup>22</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu penulis akan menganalisis data tersebut supaya bisa ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan dari data yang telah diperoleh. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur dalam melakukan penelitian yang menjelaskan data sehingga memperoleh kesimpulan agar pembaca bisa membaca secara verbal.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004), h.127.

<sup>23</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

Dengan demikian metode penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk dalam menerangkan hasil penelitian yang sifatnya memaparkan dengan jelas mengenai apa yang telah didapat di lapangan. Dengan cara menyusun dan memaparkan keadaan yang terjadi secara sistematis dan sesuai dengan teori yang ada. Guna untuk mencari kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah tersebut.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.34.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Fiqh Siyasah

###### a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* ialah *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk kata *mashdar* dari sebuah tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Secara terminologis, *fiqh* lebih didefinisikan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.<sup>25</sup>

Kata *fiqh* yang ditambah "ya nisbah", gunanya ialah untuk menunjukkan suatu jenis. Secara etimologi, kata *fiqh* berasal dari sebuah kata *fiqhan* yang merupakan *mashdar* dari kata *fī'il mādhi faqiha* yang memiliki arti paham. Kata *fiqh* mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah:

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا  
رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

---

<sup>25</sup>Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 2

Artinya: “Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.” (Q.S. Hud [11: 91).

Dalam Alquran, makna *fiqh* sebenarnya lebih dekat kepada makna ilmu, sebagaimana firman Allah:

وَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”(Q.S. Al-Taubah[9]: 122)<sup>26</sup>

Dari ayat di atas, tampak jelas bahwasahnya pengertian dari *fiqh* di sini lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dalam kajian *ushûl al- fiqh*, *fiqh* dimaknai dengan ”pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci rinci.” Pengertian ini menunjukkan bahwasahnya *fiqh* adalah hasil dari suatu *ijtihad* yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang

<sup>26</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita III, 1982/1983), h. 206.



disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Alquran dan Sunnah.<sup>27</sup>

Terdapat istilah lain dari *fiqh siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata Negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam. Mengenai asal kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al- Arab* memiliki mengatur, mengurus, serta memerintah. *Siayasah* bisa juga bisa berarti pemerintahan dan politk, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu melalui cara yang membawa pada kemaslahatan. Sementara dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* ialah membuat kemaslahatan manusia dengan cara membimbing mereka ke jalan yang bisa menyelamatkan. *Siyasah* merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas di dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.<sup>28</sup>

Adapun Ibn ‘aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan: “*Siyasah* merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan juga lebih jauh daripada kemudharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukannya.”

---

<sup>27</sup> Toha Andiko, *Pemberdayaan Qaw’aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Moder*, *Jirnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 105-106, (On-line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32> (02 Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>28</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.22

Pengertian *fiqh siyasah*, ialah ilmu yang memang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk dari pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan juga kebijaksanaan yang sudah dibuat oleh penguasa atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwahnya *siyasah* ialah “peraturan perundang yang memang diciptakan supaya bisa memelihara ketertiban juga kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun menurut Louis Ma'luf memberikan batasan dimana *siyasah* ialah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sementara Ibn manzhur mendefinisikan *siyasah* yang merupakan “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengatarkan manusia kepada kemaslahatan”.<sup>29</sup>

#### b. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama dalam ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* diantaranya ada yang terbagi menjadi lima bidang, pun ada yang mempersempitnya lagi menjadi tiga bidang, serta ada juga sebagian ulama yang membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* dalam delapan bidang. Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah*

---

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4

(ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), juga *siyasah idariyyah* (administrasi negara).<sup>30</sup>

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* terbagi tiga, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan juga keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian dalam *fiqh siyasah* ada delapan bagian, yaitu :<sup>31</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan),
- 2) *Siyasah Tasr'iyah Syari'iyah* (Politik Hukum),
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan),
- 4) *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter),
- 5) *Siyasah Idariyyah Syari'iyah* (Politik Administrasi Negara),
- 6) *Siyasah Dauliyyah Syari'iyah / Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (Politik Hubungan Internasional),
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan),
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (Politik Peperangan).

#### c. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Pada penjelasan dari *Fiqh Siyasah* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqh Siyasah*, yang mana *fiqh siyasah* bersumber dari nash-nash Al-Quran dan juga

<sup>30</sup> *Ibid. h. 14*

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993), H. 15

Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>32</sup>

Allah Swt. berfirman :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4] : 59).

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatu'l-Lah telah menetapkan, bahwasahnya di antara manusia ada para Rasul yang

<sup>32</sup> H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.

akan menyampaikan syari'at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.<sup>33</sup>

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur'an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu'min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan asas yang lebih kokoh.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, Penerjemah : Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h. 119

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 121.



Dalam *fiqh Siyasah*, *Amar ma'ruf nahi mungkar* serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.<sup>35</sup>

## 2) Al-Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah* ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.<sup>36</sup> Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَفْرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

*“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, iaberkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam: ‘Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR. al-Baihaqy).*

## d. Pengertian Ulil Amri

Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Imam Ahmad: “Ulil amri ialah para ulama”. Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Abu hurairah bahkan menyatakan: “Mereka adalah para pemimpin.”

<sup>35</sup>Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*..., h. 15.

<sup>36</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993), H. 47.

Ibnu Taimiyah mengatakan: “Ulil amri ialah seseorang yang memegang perkara serta pemimpin. Mereka merupakan orang-orang yang memberikan perintah kepada setiap manusia. Bahkan termasuk juga didalamnya adalah orang yang memegang kekuasaan dan kemampuan, serta orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teologi.

Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan: “Ulil amri ialah para ahli pikir yang banyak dikenal oleh masyarakat. Memiliki kesempurnaan dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan. Tidak hanya mencari kemaslahatan tapi peduli pada kemaslahatan tersebut.<sup>37</sup>

Ulil amri juga bukanlah kaum elit yang disebut *fukaha* atau *mujtahid* dalam fikih islam yang mana mereka harus mahir dalam menguasai ilmu Al-quran dan Hadis serta ilmu bahasa. Hal ini dikarenakan kewajiban taat an hormat kepada ulil amri biasanya tidak sampai pada sisi ilmu ini saja serta tidak dapat menerka untuk bisa mengetahui sebagian besar urusan-urusan umum, seperti urusan perdagangan, peperangan, pertanian, perdamaian, administrasi, politik, perindustrian, serta pertanian.

Ulil amri ada tiga macam, *pertama*, pakar dalam ahli pikir mengenai perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan telah dipercaya atau dipilih untuk urusan tersebut. *Kedua*, para penguasa dan juga para umara. *Ketiga*, para pakar yang menjadi rujukan dalam hal yang berkaitan dengan perundang-undangan haram maupun halal.

---

<sup>37</sup> Faris Abdul Khaliq, *Fikih politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.83.

Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang akan memberikan hukuman pada setiap orang yang bertengkar dalam segala perkara. Dimana perkara tersebut akan dikembalikan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Sebagaimana telah tercantum dalam QS. An-Nisa (4): 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya).*

Dalam kitab tafsir Al-Maraghi surah An-Nisa ayat 59 ini menafsirkan bahwa manusia harus taat kepada Allah dan amalkanlah kitab-Nya, kemudian taatlah kepada Rasul karena beliau menerangkan bagi manusia apa-apa yang diturunkan pada mereka. Sunnatu ‘I-Lah telah menyampaikan syari’at Allah kepada mereka, dan kita wajib menaati mereka.

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan kemaslahatan umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah juga sunnah Rasulullah yang mutawatir. Di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Apabila *Ahlul 'l-Halli wa 'l-Aqdi* dari kaum mu'minin telah ber-*ijma'* (sepakat) atas suatu urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada *nash*-nya dari Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak dipaksa, maka menaatinya adalah wajib.<sup>38</sup>

Asy-Syathibi menyebutkan dalam *Al-Muwafaqat*-nya perihal makna dari ulil amri yang ada di dalam Surah An-Nisa, yaitu “ulama dan umara”.

Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan bahwa ulil amri terbagi dalam dua golongan :

- 1) Ulil amri keagamaan, yang dimaksud dengan ulil amri keagamaan adalah ahli fatwa (*mufti*) dan juga ara *mujtahid*.
- 2) Ulil amri keduniaan, yang dimaksud dengan ulil amri keduniaan adalah orang-orang yang saat ini disebut dengan dewan eksekutif dan legislatif.

Ulil amri juga disebut sebagai orang-orang yang memegang tanggung jawab mengenai urusan-urusan masyarakat yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan mereka. Masyarakat akan tentram dan damai jika mengikuti mereka (ulil amri). Namun, jika pemerintahan mulai menyimpang dari sebab musyawarah, sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri itu adalah individu sultan atau raja dan juga umara,

---

<sup>38</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986), h. 119.

meskipun mereka zalim. Sedangkan sebagian ulama lain berkata bahwa, mereka adalah para *mujtahid* pada bidang fikih secara khusus.

Namun saat ini, ulil amri lebih dikenal sebagai para ulama besar, para hakim, komandan militer, para konglomerat, bahkan juga para petani yang bergerak dibidang kemaslahatan umum. Tidak hanya itu, para ketua partai, dokter, pengacara, paa cendikiawan, yang dipercaya oleh rakyat dalam memperjuangkan kemaslahatan mereka juga menjadi rujukan dalam setiap kesusahan dimanapun keberadaan mereka.

Kewajiban untuk taat kepada ulil amri juga menjadi penguat akan yang dimaksud dengan definisi ulil amri. “Dan wajib taat kepada ulil amri – mereka adalah *Ahlul Hilli wal Aqdi* yang terdiri dari para pemimpin dan para ulama yang dipercaya oleh rakyat – dalam segala hal yang berkaitan dengan keputusan yang mereka buat dan juga meraka tetapkan. Keputusan yang ditetapkan juga melalui musyawarah serta dari peraturan-peaturan sipil, politik, dan peradilan.

Imam Muhammad Abduh juga mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah *Ahlul Hilli wal Aqdi* yang terdiri dari kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimaksud adalah mereka yang terdiri dari para umara, para ulama, para hakim, para komandan militer, dan para pemuka yang dijadikan rujukan oleh para manusia dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan umum.



Dengan begitu, *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah ulil amri yang dimaksud dalam kitab Allah. Merekalah yang megatur sekaligus dua kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan legistalif. Namun, sebagian tetap ada yang menyebutkan bahwa ulil amri adalah para hakim dan para wakil rakyat.

Jadi kesimpulannya, ulil amri adalah *Ahlul Halli wal Aqdi*, atau bisa disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dari golongan yang disebut pemimpin dan juga umara. Hal ini berarti, ulil amri juga dinamakan atau disebut dengan dewan legislatif dizaman sekarang.

Kami menyebut kelompok para penguasa dari para pejabat dengan sebutan “ulil amri bidang eksekutif” sedangkan kelompok *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah “ulil amri di bidang legislatif dan juga dewan pengawas pejabat”.<sup>39</sup>

e. Tugas Ulil Amri dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Fiqh Siyash

Menurut Imam Al Mawardi, tugas-tugas yang harus diemban oleh ulil amri (kepala Negara) adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga agar agama tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam.
- 2) Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.

---

<sup>39</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih politik Islam*...., h.84-87.

- 3) Menjaga keamanan masyarakat.
- 4) Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya.
- 5) Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh Islam tidak dapat menyerang negara Islam.
- 6) Berjihad melawan pihak yang menentang Islam.
- 7) Menarik fai'i dan memungut zakat sesuai ketentuan syariat Islam.
- 8) Menentukan gaji dan besarnya 'atha kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari baitul-maal dengan adil.
- 9) Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan kompeten dalam membantunya menunaikan amanah.
- 10) Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan pembantunya dan meneliti jalannya kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.<sup>40</sup>

Allah berfirman dalam QS. Ashaad:26 :

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا ذُنُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti

<sup>40</sup> <http://emmyfaryda.blogspot.com/2012/03/ulil-amri-dalam-islam.html>, diakses pada 02 Agustus 2019

*hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Ashaad [38] : 26).*

Allah SWT tidak semata-mata memberikan mandat tanpa wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga menyifatnya dengan sesat. Meskipun ia mempunyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan kepala negara, namun ia termasuk bagian dari hak-hak politik seluruh rakyat. Nab Saw bersabda:

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ. وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinan kalian.” (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).*

Islam merupakan agama yang sempurna juga amat lengkap sebagai suatu sistem dalam kehidupan yang tak hanya meliputi tuntunan moral serta peribadatan, tetapi meliputi sistem politik termasuk bentuk juga ciri-cirinya, sistem pemerintahan dan sebagainya. Al-Quran dan sunnah sebagai dasar hukum Islam sudah menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya. Selain itu Islam juga meletakkan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut,<sup>41</sup> yaitu :

#### 1) Pinsip Persatuan dan Persaudaraan

Suatu bangsa, umat dan juga negara tidak mampu berdiri tegak kalau di dalamnya tidak ada persatuan serta persaudaraan antar warganya. Persatuan serta persaudaraan ini tidak mungkin terwujud kalau

<sup>41</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah, Ajaran, ....*, h. 209.

tidak ada saling kerja sama juga mencintai. Setiap jamaah yang tidak diikat melalui ikatan kerja sama serta ikatan kasih juga sayang serta persatuan yang sebenarnya, tidak mungkin bisa bersatu dalam satu prinsip untuk bisa mencapai tujuan bersama. Persatuan dan persaudaraan suatu umat atau jamaah merupakan fondasi dan faktor-faktor terbentuknya sebuah negara yang kokoh.<sup>42</sup>

Persaudaraan itu mengajarkan pada suatu prinsip keyakinan yang tidak membedakan antar bangsa-bangsa, ras, dan sebagainya. Prinsip ini mengajarkan persaudaraan dalam hal yang begitu luas yang mana meliputi semua golongan manusia. Baik dalam Piagam Madinah ketetapan yang mewujudkan persatuan dan persaudaraan di kalangan penduduk Madinah juga menggambarkan bentuk hubungan antara golongan Islam dan Non-Islam di berbagai aspek kehidupan. Hal ini memperlihatkan bahwa Nabi tidak membentuk persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat Islam saja.

Pada zaman modern ini setiap pemerintahan suatu negara memandang prinsip persatuan serta persaudaraan ialah hal yang harus dibina serta ditegakkan sebagai persyaratan bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.<sup>43</sup>

## 2) Prinsip Kebebasan

Kebebasan ialah hak dasar hidup setiap orang serta merupakan pengakuan dari seseorang atau kelompok atau persamaan dan kemuliaan

---

<sup>42</sup>J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.142.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 149

harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan oleh semua orang yang memang hidup ditengah-tengah masyarakat yang terdiri atas golongan yang memang beraneka ragam baik dari segi etnis, kultur, agama, keyakinan, maupun ekonomi. Apabila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan antara satu golongan terhadap golongan yang lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.

Karena itu prinsip kebebasan mutlak dan perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Ada beberapa kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan oleh setiap manusia yaitu, kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan masih banyak lagi kebebasan lain.<sup>44</sup>

### 3) Prinsip Hidup Bertetangga

Prinsip Pemerintahan yang menjangkau luas tidak hanya mengatur tentang masalah dalam komunitas penduduk dalam kehidupan sosial secara umumnya saja, tetapi juga mengatur secara khusus tentang hubungan atau pergaulan hidup bertetangga.

Mereka yang bertetangga harus saling menghormati, tidak boleh saling menyusahkan dan saling melakukan perbuatan jahat. Setiap rumah

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 156.



tangga atau keluarga harus memperlakukannya seperti diri sendiri. Sebab, keharmonisan hubungan dan pergaulan dalam hidup bertetangga menjadi sendi bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat suatu negara, terlebih lagi dalam masyarakatnya yang bercorak majemuk.

Dalam hal ini baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh maupun tetangga itu dari keluarga muslim, keluarga nsarani, maupun keluarga musyrik, setidaknya haruslah diperlakukan dengan baik dan hak-haknya harus dihormati. Atas dasar ini, maka ketetapanannya bersifat global yang dimana tidak hanya mengatur kehidupan bertetangga dikalangan masyarakat saja tetapi juga mengatur kehidupan bertetangga antar komunitas-kommunitas yang menetap di luar negara (*city-state*).<sup>45</sup>

Dalam catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian dan menjalin hubungan persahabatan dengan komunitas-komunitas yang menetap di luar kota Madinah serta menghormati hak-hak mereka. Tidak hanya itu dengan sikap Nabi yang bersahabat dan cinta perdamaian, menjalin hubungan damai dan persahabatan dengan tetangganya yang hampir semua kelompok masyarakat yang ditinggal di Jazirah Arab.<sup>46</sup>

Jika dalam suatu negara mempraktikkan dan mengikuti Prinsip hidup bertetangga ini, tidak hanya terwujudnya ketertiban dan kemanan serta kesejahteraan bersama tetapi juga menjadikan beberapa negara yang berdekatan atau bertetanggaaan menjalin hubungan kerja sama yang baik,

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 187.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 188.

tidak adanya saling mengganggu, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negaranya masing-masing.

#### 4) Prinsip Perdamaian

Perdamaian merupakan ajaran dasar yang penting dalam Islam untuk mempererat persatuan dan solidaritas antar sesama manusia baik antar kelompok sosial maupun antar bangsa, sehingga terciptanya hubungan yang baik dan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam hubungan ini Al-Maududi menyatakan : “Muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat. Jika kelompok non-Muslim memperlihatkan sikap bersahabat dan damai, Muslimin juga harus bersikap ramah dan bersahabat dengan mereka. Berurusan secara jujur dan adil.”<sup>47</sup>

Ini merupakan suatu prinsip dalam Islam bahwa Allah melarang orang-orang mukmin melanjutkan permusuhan terhadap musuh yang sudah mau berdamai dan menyerah. Sebab, Islam tidak membolehkan umatnya melanggar hak orang lain kecuali terhadap orang yang melanggar hak mereka, dan tidak pula memerangi mereka.

Dalam catatan sejarah Islam, terdapat praktek Nabi dan umat Islam mengadakan perdamaian dengan pihak non-Muslim, seperti dengan pihak kaum musyrik dan kaum Yahudi. Dengan pihak kaum musyrik dikenal dengan *shulh al-Hudaibiyyat* (perjanjian Hudaibiah) pada tahun 6 H. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian damai antara umat Islam dan kaum musyrik.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 204.

Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiah, Nabi kemudian menerima perdamaian dari kaum Yahudi yang menetap di Khaibar. Perdamaian ini terjadi karena kekalahan dari pihak kaum Yahudi Khaibar saat bertempur habis-habisan dengan kaum Muslimin. Sementara kaum Yahudi di Fadak, setelah mendengar kekalahan Yahudi Khaibar, segera membuat persetujuan damai dengan menyerahkan separuh harta benda mereka tanpa terjadi pertempuran sebelumnya. Demikian juga dengan kaum Yahudi di Taima menyerah sebelum terjadi pertempuran dan mereka bersedia membayar *jizyah* (pajak).<sup>48</sup>

Karena itu perdamaian merupakan syarat utama terlaksananya hubungan baik dan langgeng antara kelompok-kelompok sosial dan antar bangsa. Perdamaian dalam Islam bersifat universal, tanpa batas, dengan siapa pun boleh dilaksanakan.

##### 5) Prinsip Pelaksanaan Hukum

Perintah berlaku adil yang berkaitan dengan berbuat *ihsan* (kebaikan), larangan berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan bertujuan supaya keadilan bisa terwujud. Berbuat kebaikan berarti memenuhi dan melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Bila hukum terlaksana, maka keadilan pun akan terpenuhi. Memberi kepada kaum kerabat berarti memenuhi hak-hak mereka, baik lahir maupun batin secara seimbang. Larangan berbuat keji, kemunkaran, dan permusuhan berkaitan dengan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 208.

terpeliharanya hak-hak dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terpeliharanya hak-hak orang lain.

Bidang aktivitas hidup manusia lain yang dituntut oleh al-Quran dari setiap orang yang berlaku adil adalah bidang takaran dan timbangan, yaitu menyempurnakannya dengan adil. Penimbangan atau penakar harus menakar atau menimbang sesuatu secara jujur. Ia tidak boleh mengurangi sedikit pun yang menjadi hak orang lain, sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka orang lain terhadapnya.<sup>49</sup>

Demikian dalam kehidupan sosial dan politik, orang-orang mukmin diperintahkan agar mendamaikan dua golongan mukmin yang berkonflik atau berperang dengan adil dan memulihkan hak-hak masing-masing secara seimbang. Orang mukmin juga diperintahkan berbuat baik dan memberi apa yang menjadi hak dan bagian terhadap golongan non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir mereka karena alasan agama, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.<sup>50</sup>

Prinsip penetapan hukum ini sudah diterapkan pada masa zaman Nabi menjadi khalifah, yang dimana konstitusi pertama yaitu Piagam Madinah yang secara konstitusional mempunyai dasar hukum untuk menindak peserta perjanjian yang melakukan makar yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 229.

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 230.

#### 6) Prinsip Kepemimpinan

Dalam kehidupan bersama diperlukan adanya pemimpin, karena agar kehidupan bersama itu berjalan sebagaimana semestinya dan suatu perjanjian dapat dilaksanakannya. Dalam suatu masyarakat yang teratur, jika timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mesti ada penyelesaian mekanisme pemimpin dengan fungsinya yang jelas, ataupun untuk menggerakkan masyarakat itu supaya mengambil keputusan, dan ataupun yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan bersama.

Tugas seorang pemimpin yang dimana merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan selain menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan di kalangan rakyatnya tetapi seorang pemimpin juga harus berwibawa dan tidak bertindak otoriter.

#### 7) Prinsip *Amar Makruf*, dan *Nahi Munkar*

Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang di ridai Allah.<sup>51</sup>

Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 262.

munkar. Karena tugas *amar makruf nahi munkar* merupakan identitas umat Islam sebagai umat terbaik.

Dalam Firman Allah Swt. :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran [3] : 110)

Dalam ayat ini kewajiban umat Islam saling menyeru kepada kebaikan, saling menyuruh pada perbuatan makruf dan saling mencegah dari yang munkar. Mukmin mempunyai hak untuk menasihati mukmin lainnya supaya mengikuti perilaku yang benar dan mencegahnya dari perbuatan salah atau dosa.

Prinsip *amar makruf nahi munkar* harus di implementasikan sebagai salah satu prinsip konstitusi atau perundang-undangan negara yang dilaksanakan secara konsekuen juga efektif. Supaya pemerintah menjalankan kepentingan terbaik negara serta melaksanakan tugas *amar makruf* dan *nahi munkar* dengan baik sebagai cerminan ketakwaan.

#### 8) Prinsip Musyawarah

Al-Quran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai unsur dari unsur-unsur pijakan Negara Islam. Kata musyawarah dalam



realitanya lebih luas maknanya daripada demokrasi, sebab demokrasi terkadang hanya bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.<sup>52</sup>

Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang teladan telah membudayakan praktik musyawarah di kalangan sahabat-sahabatnya. Beliau seringkali bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan ketatanganan. Ketika Nabi membawa berita bahwa kaum Quraisy telah meninggalkan kota Makkah untuk berperang melawan kaum muslimin, beliau belum menetapkan sikap kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Untuk itu beliau bermusyawarah dengan mereka untuk membicarakan kondisi mereka, seperti belanja perang, dan jumlah pasukan mereka. Beliau meminta sikap dan pendapat kaum Ansar sebagai golongan terbesar kaum muslimin dalam menghadapi perang tersebut. Dan beliau mendapatkan dukungan dari kaum Ansar dan mereka bersedia mengorbankan segalanya demi perjuangan Nabi Muhammad SAW.<sup>53</sup>

Tidak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenang-wenangan yang terlarang. Itu menunjukkan bahwa Allah Swt.

---

<sup>52</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik*..., h. 52.

<sup>53</sup>J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Op.,cit., h. 209.

Menghendaki politik kaum muslimin ini berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, tidak seorang pun yang merasa dizalimi.<sup>54</sup>

#### 9) Prinsip Berlaku adil

Berlaku adil adalah pilarnya negara dan merupakan dasar kewenangan. Berlaku adil ini dibebankan kepada para penguasa juga kepada pemerintahan. Dalam Firman Allah Swt. :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa [4] : 58).

Ayat yang turun perihal ulil amri ini menerangkan bahwa mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum diantara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa atau pemerintah dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.<sup>55</sup>

Menegakkan keadilan adalah kewajiban syariat bagi orang-orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah Yang Maha Adil, sebagai

<sup>54</sup>Ibid., h. 51.

<sup>55</sup>Ibid., h.202.

tindakan persaksiannya. Dalam upaya penegakkan keadilan, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain, kepemimpinannya harus berfungsi untuk menegakkan keadilan dan harus berperilaku adil, dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial sekecil apapun keadilan harus ditegakkan.

Seluruh umat muslimin diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hukum, perkataan, perbuatan, dan sopan santun. Sebagaimana mereka juga diamanatkan untuk berlaku adil dalam berpolitik, keagamaan, dan melaksanakan kewenangan negara.

#### 10) Prinsip Persamaan

Nash-nash Al-Quran dan hukum-hukumnya telah menuturkan dengan menetapkan “persamaan hak”. Sebagaimana Allah memerintahkan berlaku adil, Allah juga menetapkan persamaa hak antara manusia seluruhnya, didalam surah-surah makkiyah dan madaniyah, dan adil dalam bahasa artinya penyamarataan.

Persamaan antara manusia menjadi dua dasar untuk tidak menjadikan perbedaan mereka dalam jenis, warna kulit, dan keturunan sebagai tolak ukur keutamaan atau permusuhan, sebab kebijaksanaan Allah telah memutuskan bahwa maksud perbedaan ini adalah untuk saling mengenal dan saling membantu antara umat dan bangsa.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 222.

Allah Swt. Berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49] : 13).

Allah menjadikan takwa kepada-Nya sebagai tolak ukur keutamaan atau kemuliaan di sisi-Nya. Di antara sikap takwa kepada-Nya adalah berbuat baik dan berlaku adil di antara manusia. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, juga tidak ada perbedaan antara orang yang miskin dan orang yang kaya, semua di sisi Allah adalah sama.

f. Kaidah-Kaidah Pemerintahan Dalam Fiqh Siyasah

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.<sup>57</sup> Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, ekonom, militer, pengusaha, cendikiawan, maupun rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat.

<sup>57</sup>H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), H. 80

1) الضَّرَرُ يُزَالُ (Yang Berbahaya Itu Dihilangkan)

Kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan.<sup>58</sup> Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus jauhkan dari *idharar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain. Mudarat tidak bisa hilang dengan kemudharatan lain.<sup>59</sup>

Kaidah ini penting dalam pengembangan hukum Islam. Kaidah ini berlaku secara luas dalam berbagai objek kajian fiqh. Tidak terhitung banyaknya ketetapan hukum fiqh yang menerapkan kaidah ini, baik ketetapan hukum mengenai pemeliharaan manfaat maupun penolakan kerusakan atau bencana, bahkan termasuk juga pemeliharaan kemaslahatan dlaruriyat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, harta, dan kehormatan.<sup>60</sup>

Upaya pemerintah dalam pembentukan dan pembaharuan hukum dengan kaidah ini akan menghasilkan hukum yang berkeadilan. Karena pembentukan dan perumusannya sudah mengacu pada menghilangkan yang berbahaya, baik yang berbahaya bagi diri sendiri dan yang berbahaya bagi orang lain.<sup>61</sup>

<sup>58</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), H.159

<sup>59</sup>Nurhayati, Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, H. 72

<sup>60</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam....*, *Ibid.h.159*

<sup>61</sup>Bunyana Sholihin, *Ibid. h. 222*

2) تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (Tindakan Atau Kebijakan Pemerintahan Terhadap Rakyat Tergantung Kepada Kemaslahatan)

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan apresiasi rakyatnya. Jika apresiasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.<sup>62</sup>

Tindakan dan kebijaksanaan yang mendorong berkembangnya prakarsa dan kreativitas rakyat untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri. Dalam kaitan ini, berdasarkan kaidah ini, dibutuhkan pemimpin negara yang kepemimpinannya dapat diterima (akseptabel) dan mampu memikul tanggung jawab yang diberikan (kapabel). Tetapi apabila tidak ada calon yang memenuhi dua persyaratan ini, calon yang hanya akseptabel atau hanya kapabel boleh diterima. Alternatif ini menghindari tidak terjadinya kekacauan dan kesulitan negara, selama belum ditemukan calon pemimpin yang kapabel sekaligus akseptabel.<sup>63</sup>

3) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak Boleh Membuat Bahaya dan Membalas perbuatan bahaya kepada orang lain).

Kaidah ini melarang berbuat bahaya (ضرر), hadis yang periwayatannya sesuai dan menjadi dasar dari Kaidah ini adalah hadis yang di riwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Sa'id al-Hudri :

<sup>62</sup>H. Muhammadong, *Good Governance Dalam...., Ibid.*, h. 83

<sup>63</sup>J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan ...., Ibid.* h. 41-42



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abi Sa’id Sa’d bin Mâlik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda, Tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain maka Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkan orang tersebut.”(HR. Al-Hakim)<sup>64</sup>

Pada dasarnya segala bentuk tindakan membahayakan terhadap orang lain dapat tersentuh oleh hukum kaidah ini. Manusia dilarang berbuat bahaya terhadap orang lain dan diperintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu yang bernyawa terutama terhadap manusia.<sup>65</sup>

#### g. Lembaga *Al-Hisbah*

Lembaga *Al-Hisbah* adalah suatu lembaga pengawasan dalam Islam. Kata pengawasan sendiri berasal dari kata awas yang berarti penjagaan. Di dalam pandangan Islam pengawasan terbagi dalam dua hal, yaitu *pertama*, sebagai kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri dan bersumber dari keimanan kepada Allah SWT dan tauhid.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Infithar [82] : 10-12.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠﴾

<sup>64</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Anglo Media, 2004), H. 127

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 130.

Artinya: “*Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu. Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al- Infithar [82]:10-12).

Lalu kemudian harus juga didasari atas dasar ketaqwaan yang tinggi terhadap Allah SWT. Dengan adanya ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, tentu akan ada rasa takut dan khawatir untuk melakukan segala kecurangan dalam pekerjaan. Merasa diri bahwa Allah SWT akan senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. *Kedua*, suatu pengawasan tentu akan lebih efektif apabila sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan seperti ini terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang tentunya memiliki keterkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah di delegasikan, perencanaan dan kesesuaian antara penyelesaian tugas.<sup>66</sup>

Kata *Hisbah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ha-sa-ba* yang bermakna menaksir, memperhitungkan, opini, memikirkan dan lain-lain. Dalam arti etimologi *hibah* memiliki arti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.<sup>67</sup> Kata *Hisbah* secara terminologi berasal dari kata HSB mempunyai arti menghitung berarti pula kalukasi, berpikir, pandangan,

---

<sup>66</sup> Achmad Safiudin R, *Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah* (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 6, No. 1 oleh Universitas Brawijaya, Malang, April 2016), h. 85-86 (On-Line) tersedia di: <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/>, (19 Agustus 2019), dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>67</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), h. 409.

memberikan opini dan lain-lain. Secara teknis, *hisbah* berarti instansi Negara yang mendukung kebaikan serta mencegah kemungkaran.<sup>68</sup>

*Hisbah* merupakan salah satu institusi atau lembaga yang diletakkan langsung oleh Rasulullah SAW, beliau sendiri merupakan muhtasib pertama di dalam agama Islam. Pada suatu riwayat menceritakan, bahwa Rasul pernah berjalan di pasar dan menghampiri penjual makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukkan makanan. Beliau sangat terkejut ketika mendapati tangannya basah, dan pedahang berkata: “makanan itu terkena hujan ya Rasulullah.”

Selain itu, Nabi juga menolak permohonan dari para sahabatnya untuk menentukan harga yang sesuai untuk kaum muslimin karena harga yang ditawarkan di pasar sangat tinggi. Selain Nabi memiliki akhlak yang mulia, Nabi juga sangat memperhatikan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW memperhatikan lembaga penegakkan dan pelestarian nilai-nilai dengan menyerukan kepada semua orang agar melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Setelah Nabi wafat lembaga *Al-hisbah* ini tetap dipertahankan dan dilanjutkan oleh sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab, beliau memberikan tugas kepada Abdullah bin Utbah sebagai pengawas pasar di Madinah dan Sa'id ibn al-As ib Umayyah pengawas di pasar Mekkah. Kedudukan muhtasib pada saat itu sama halnya (setara) dengan pejabat

---

<sup>68</sup> Yayasan Al-Hisbah Bogor-Indonesia, “Definisi Hisbah” (On-line), tersedia di: <http://www.hisbah.net> (14 Januari 2013).

yang diangkat oleh Nabi Muhammad seperti panglima perang, amir dan lain-lain.

Keberadaan lembaga *Al-Hisbah* atau lembaga pengawas ini sangat penting, yang mana di dalam Al-Quran pun mengamanatkan adanya lembaga pengawasan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran [3] : 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali-Imran: 104).

Ini menunjukkan arti penting lembaga pengawasan dalam istilah Al-Quran “segolongan umat” yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu *al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar*. Mengubah kemungkaran dan memastikan prinsip pengawasan harus tetap dilaksanakan karena itu merupakan tanggung jawab bersama. Inti dari tugas lembaga pengawasan adalah untuk menutup seluruh pintu yang mendatangkan kerusakan dan mencari segala kemaslahatan. Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa *amar ma’ruf nahi munkar* sudah sejalan dengan diturunkannya syariat Islam pada Nabi Muhammad SAW.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, h. 42.

Lembaga *Al-Hisbah* sendiri memiliki fungsi yang tidak dapat dihapuskan dari struktur pemerintahan Islam. Terutama dalam hal penegakkan hukum. Fungsi lembaga ini adalah ekspresi dari karakteristik dan nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri. Hal ini apabila dihapuskan, maka identitas keislaman dalam pemerintahan akan ikut terhapus.

Lembaga ini memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi Ekonomi

*Al-Hisbah* berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, seperti mengawasi takaran, harga dan juga timbangan. Selain itu mengawasi praktek jual beli terlarang dan lain-lain. Ibn Taimiyyah memaparkan fungsi muhtasib lebih jelas sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a) Memastikan kebutuhan pokok tercukupi, muhtasib harus selalu memeriksa ketersediaan barang dan kebutuhan pokok lainnya. Jika terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa maka muhtasib memiliki kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung.
- b) Pengawasan terhadap suatu produk, muhtasib dalam bidang industri berfungsi untuk mengawasi standarisasi produk.
- c) Pengawasan terhadap suatu jasa, muhtasib berwenang untuk memeriksa apakah seorang dokter dan sebagainya sudah melaksanakan tugas dengan baik atau belum.

---

<sup>70</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 175.

- d) Pengawasan perdagangan, muhtasib berwenang mengawasi pasar secara umum. Mengawasi timbangan, takaran serta ukuran dari kualitas produk. Menjamin bahwa setiap pedagang tidak akan melakukan kecurangan.

## 2) Fungsi Sosial

Lembaga *Al-Hisbah* berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dan juga keadilan distribusi dalam hidup bermasyarakat. Tugasnya memberikan informasi pada seluruh pedagang dan juga konsumen serta memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang juga menghilangkan penguasaan sepihak yang terjadi dalam jalur produksi dan distribusi pasar. Agar dapat menciptakan harga barang yang adil.

## 3) Fungsi Moral

Mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pasar merupakan sasaran utama dari lembaga *hisbah* dikarenakan di pasar seringkali terjadi penipuan, kecurangan, pemaksaan dan praktek kesewenang-wenangan.

## 2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

### a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menyebutkan pengertian dari Satpol PP.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja



Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota satpol pp sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindung masyarakat.

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan Perda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dibentuk Satpol PP. Pada umumnya yang disebut pamong praja adalah pejabat-pejabat Pemerintah (Pusat) yang bernaung dalam Departemen Dalam Negeri yang ada di daerah. Dengan demikian pamong praja mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas pamong praja mencakup segenap pegawai dalam lingkungan departemen dalam negeri yang ada dan bekerja di daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Umum. Dalam arti sempit yang

disebut pamong praja hanya mencakup mereka yang memegang pimpinan dan menjadi kepala daerah dari suatu wilayah administratif.<sup>72</sup>

b. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Mengenai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi serta wewenang dari satuan polisi pamong praja telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi serta wewenang dari satuan polisi pamong praja, adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan polisi praja dibentuk untuk menyelenggarakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
  - a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur. Atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  - c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

---

<sup>72</sup> Drs. Bayu Surianingrat, *Pamong Praja Dan Kepala Wilayah*, (Jakarta: RinekaCipta, 1990), h.7.

- d) Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada.

Untuk lebih jelasnya, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari satuan polisi pamong praja tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tepatnya terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 11. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas :

- a. Menegakan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Mengenai fungsi Satpol PP, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

c. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa satuan polisi pamong praja adalah perangkat daerah yang memang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum. Tugas pokok dan fungsi tersebut memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum dari satuan polisi pamong praja tercantum dalam:

- 1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

### **3. Pedagang Kaki Lima**

#### **a. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

PKL ialah pedagang yang dikategorikan sebagai salah satu jenis pekerjaan yang cukup penting serta relatif, khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah PKL sendiri mengacu pada konotasi para pedagang yang cara berdagangnya dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang menurut mereka strategis. Terdapat pula golongan pedagang yang berdagang dengan memakai gerobak dorong dan kios-kios kecil. Oleh sebab itu, menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai PKL.

Latar belakang seseorang menjadi PKL menurut Alisjahbana adalah karena:

- a. Terpaksa; sebab tak ada pekerjaan lain, terpaksa disebabkan tak mendapat pekerjaan di sektor formal, sehingga terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup serta keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, juga terpaksa sebab tak memiliki bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;

- b. Ingin mendapat rejeki yang halal daripada hanya menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;
- c. Ingin bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;
- d. Ingin menghidupi keluarga serta memperbaiki taraf kehidupan, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan;
- e. Sebab di desa sangat sulit mencari penghasilan<sup>73</sup>.

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: “Para PKL yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya ialah golongan dari masyarakat yang tergolong marginal serta tak berdaya<sup>74</sup>. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari kerasnya arus kehidupan kota serta ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sementara dikatakan tidak berdaya, sebab mereka biasanya tak terjangkau dan tak terlindungi oleh hukum, tawar dan menawarnya pun lemah, serta sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota oleh aparat yang bertugas.

Istilah PKL juga terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bergerak maupun usaha tidak bergerak. Menggunakan prasarana kota,

---

<sup>73</sup> Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2006), h 147,

<sup>74</sup> Soetandoyo, Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. (Surabaya: Bayumedia Surabaya.,2008), h. 91.



fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan parkir dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang sifatnya tidak menetap/sementara.<sup>75</sup>

PKL ialah istilah untuk menyebut orang yang berdagang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian sebab jumlah kaki dari pedagangunya ada lima. Lima kaki tersebut berasal dari dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya ialah tiga atau dua roda dan satu kaki).<sup>76</sup> Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk para pedagang yang berdagang dijalanan.

Sebenarnya istilah kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwasanya setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pejalan kaki. Lebar ruas jalan pun ialah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak digunakan oleh para pedagang untuk berjualan. Dulu namanya ialah pedagang emperan jalan, namun sekarang jadi pedagang kaki lima. Padahal kalau melihat sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

#### b. Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Pedagang Kaki Lima

PKL tentu ada di setiap penjuru daerah yang ada di Indonesia. Keberadaan PKL pun sudah ada sejak puluhan tahun lamanya. Ada

---

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pasal 1 ayat (1).

<sup>76</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima), diakses pada 20 Agustus 2019.

beberapa faktor penyebab muncul dan juga berkembangnya para PKL di setiap kota besar, yaitu:

- 1) Kurang luasnya lapangan pekerjaan, populasi manusia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Akan tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia tidak banyak. Hal ini membuat banyak orang yang menganggur karena sempitnya lapangan pekerjaan. Kemudian mereka akhirnya memilih untuk berdagang dan menjadi PKL. Modalnya relatif kecil dan tidak membutuhkan persyaratan seperti di perusahaan atau instansi-instansi pemerintahan.
- 2) Sulitnya ekonomi, keadaan krisis ekonomi yang sempat menimpa di tahun 1998 telah mengakibatkan runtuhnya sektor ekonomi formal sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada sektor industri kota. Hal ini membuat mereka memilih sektor informal untuk tetap bertahan hidup.
- 3) Peluang, disamping dari dua faktor diatas, kemunculan PKL justru disebabkan oleh adanya peluang yang cukup besar. Hal ini dikarenakan menjadi seorang PKL tidak membutuhkan modal yang besar. Tidak perlu menyewa tempat usaha dan bisa dikerjakan sendiri. Selain itu, keuntungan yang didapat pun cukup menggiurkan. Pada sisi lain, banyaknya perilaku konsumtif dari masyarakat tentu menjadi peluang untuk menyediakan segala kebutuhan mereka.
- 4) Urbanisasi, arus migrasi dari desa ke kota yang terus meningkat menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam setiap kegiatan-kegiatan

penduduk kota di Indonesia tidak seluruhnya tergolong dalam kelompok pendapatan tinggi. Justru tergolong dalam pendapatan rendah dan juga menengah. Dapat dikatakan daya beli dari sebagian besar penduduk yang ada di kota masih termasuk rendah, sehingga permintaan terhadap jasa-jasa yang relatif murah harganya semakin meningkat.<sup>77</sup>

c. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima

Sebagaimana telah disebutkan mengenai pengertian dan juga faktor yang mengakibatkan berkembangnya PKL, maka dasar hukum tentang PKL serta penertiban PKL ada didalam:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 1.
- 2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.

---

<sup>77</sup> Bintardi Dwi Laksono, “*Penegakkan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*”. (Skripsi Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), h. 50-51.

## B. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian ini sama sekali tidak baru. Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”. Adapun beberapa karya lain yang pernah ditulis oleh penulis lain yaitu sebagai berikut:

Gusti Ramanda Rahman, dalam skripsi yang ditulis dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung”*, menyatakan bahwa tidak semua peraturan yang sudah ada dan diberlakukan bisa diterapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja pada Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Sudah cukup lama produk politik ini diregulasikan hanya saja tidak memiliki dampak yang signifikan pada seluruh masyarakat. Penegakkan peraturan daerah ini menjadi tanggung jawab bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini mengarah pada kinerja yang dilakukan oleh seluruh anggota Satpol PP kota Bandar Lampung terhadap Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 serta bagaimana tinjauan hukum

islamnya. Ternyata kinerja Satpol PP masih kurang memadai dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>78</sup>

Eka Novianti Pertiwi, dalam skripsi yang ditulis dengan judul *“Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Makassar (Studi Kasus Kota Makassar)”*, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah serta apa saja faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan penegakkan Perda di kota Makassar Satpol PP memiliki acuan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangannya. Mereka menempuh langkah Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dengan melakukan kerjasama bersama aparat Penertiban lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakkan Perda di kota Makassar oleh anggota Satpol PP adalah kualitas dari sumber daya manusia dan juga sarana serta prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas ataupun dana operasional.<sup>79</sup>

Silvia Heppy Octaviani, dalam jurnal yang ditulis dengan judul *“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar)”*, menyebutkan bahwa kinerja Satpol PP sudah baik apabila ditinjau dari

---

<sup>78</sup> Gusti Ramanda Rahman, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung”*, (Skripsi program studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018). h. 24.

<sup>79</sup> Eka Novianti Pertiwi, *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Makassar (Studi Kasus Kota Makassar)*, (Skripsi program studi Hukum Tatanegara Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h.13.

beberapa permasalahan yang sudah diselesaikan. Lebih banyak terselesaikannya daripada yang belum terselesaikan. Ada beberapa faktor yang berhasil mempengaruhi kinerja Satpol PP antara lain, tata kerja, sarana prasarana, dan kemampuan aparat. Untuk kendala dalam menegakkan ketertiban umum yaitu kurangnya jumlah personil dari Satpol PP, personil Satpol PP banyak yang sudah berusia lanjut dan kualitas sumber daya yang masih terbilang rendah. Selain itu masyarakat yang cenderung sering melanggar peraturan dan bencana alam juga menjadi faktor kendala dalam menegakkan Ketertiban Umum.<sup>80</sup>

Meskipun dari beberapa tinjauan pustaka di atas ada kemiripan, tapi penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada. Fokus dari pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

---

<sup>80</sup> Silvia Heppy Octaviani, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten blitar)", Jurnal Administrasi Publik, Vol . 1 No.9, 2013, h. 01.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tugas Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Berdasarkan hasil penelitian Satuan Polisi Pamong Praja telah ada sejak 30 Oktober 1948.

Satpol PP dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah dan juga menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Satpol PP kedudukannya ada di bawah Pemerintahan Daerah dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap Walikota. Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung awalnya terletak di gedung pelayanan satu atap atau dikenal dengan gedung kuning Kota Bandar Lampung. Akan tetapi saat ini kantor Satpol PP yang baru terletak di depan gedung satu atap Kota Bandar Lampung. Tepatnya di Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.

Jumlah anggota Satpol PP ada sekitar 1.078 personil yang mengisi diberbagai bidang atau divisi masing-masing yang telah ditentukan. Tentu saja setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Khusus untuk pedagang kaki lima divisi yang berhak menindak dan bertugas untuk menertibkan para pedagang adalah divisi bagian Tibum dan Keamanan Masyarakat. Divisi ini yang menangani dan mengatur para pedagang kaki lima yang ada di pasar tengah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden yang bersangkutan, Satpol PP memiliki susunan organisasi beserta tugasnya sebagai berikut :

#### 1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Satpol PP bertugas sebagai pemimpin yang mengkoordinasi dan juga melaksanakan urusan pemerintahan khususnya pada bidang penegakkan Peraturan Daerah. Selain itu kepala satuan Satpol PP juga bertugas untuk menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketentraman umum, mengembangkan sumber daya manusia (aparatur) serta menjalankan tugas sebagai perlindungan masyarakat.

#### 2. Sekertaris

Memiliki tanggung jawab terhadap kepala satuan Satpol PP serta menjalankan segala tugas dibagian kesekretariatan.

##### a. Kassubag Divisi Program & Informasi

Memberikan informasi mengenai badan satuan, menyusun rencana dan strategi dari badan satuan serta menyusun berbagai program dan kegiatan.

##### b. Kassubag Divisi Umum & Kepegawaian

Bertugas untuk mengelola dan melaporkan hal-hal mengenai administrasi umum seperti naskah dinas, menata arsip dinas, mengelola

sarana dan prasarana, melakukan urusan hubungan masyarakat serta menyiapkan keperluan rapat dinas.

c. Kassubag Divisi Keuangan & Aset

Memiliki tugas untuk mengelola keuangan dan juga asset badan satuan, melakukan pembukuan dan laporan keuangan, bertanggung jawab terhadap urusan administrasi keuangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis satuan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah

Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan perundang-undangan daerah seperti, melakukan penyuluhan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan serta penegakkan hukum.

a. Kasi Pembinaan & Pengawasan

Menyiapkan kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai peraturan perundang-undangan daerah, serta mengawasi, melaksanakan pembinaan dan melaksanakan penyuluhan.

b. Kasi Penyelidikan & Penyidikan

Bertugas untuk menyampaikan rumusan kebijakan mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan peningkatan dan penyidikan atas pelanggaran.

c. Kasi Penegakkan Hukum

Bertugas untuk menegakkan hukum, mempersiapkan bahan administrasi guna untuk melaksanakan penegakkan hukum seperti, surat teguran dan penyegelan dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait

3. Kabid Tibum & Ketentraman Masyarakat

Melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mencakup pengendalian dan operasi, kerja sama dan keamanan masyarakat.

a. Kasi Operasi & Pengendalian

Mempersiapkan bahan untuk melaksanakan operasi dan pengendalian dalam menjalankan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Kasi Kerjasama

Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerjasama operasional dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Kasi Pengamanan

Melaksanakan pengamanan objek vital seperti pengamanan rumah dinas, pimpinan, sarana dan prasarana, asset Negara dan penertiban dalam kegiatan yang berskala besar.

#### 4. Kabid Sumber Daya & Aparatur

Melaksanakan sebagian tugas didivisi pengembangan sumber daya manusia (aparatur) seperti pembinaan mental, pembinaan kesejahteraan, pengembangan dan pemberdayaan.

##### a. Kasi Pengembangan Aparatur

Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan para anggota Satpol PP, Linmas dan PPNS. Mempersiapkan bahan untuk melaksanakan pengawasan dan pengembangan kemampuan setiap anggota Satpol PP dan PPNS. Melakukan evaluasi, pelaporan dan monitoring.

##### b. Kasi Pemberdayaan Aparatur

Melakukan pemberdayaan sumber daya setiap anggota Satpol PP, Linmas dan PPNS melalui kegiatan pelatihan dasar dan juga pelatihan teknis fungsional.

##### c. Kasi Pembinaan Mental & Kesejahteraan

Melakukan pembinaan mental serta kesejahteraan para anggota Satpol PP, Linmas dan PPNS. Melaksanakan penegakkan kode etik dan disiplin setiap anggota Satpol PP.

#### 5. Kabid Perlindungan Masyarakat

Melaksanakan sebagian dari tugas satuan pada divisi perlindungan masyarakat yang meliputi pembinaan masyarakat, pembinaan potensi dan penyelamatan serta kesiagaan terhadap masyarakat.

a. Kasi Satuan Perlindungan

Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap lingkungan masyarakat serta mempersiapkan rumusan kebijakan komunikasi dan fasilitas dalam pelaksanaan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam satuan perlindungan masyarakat.

b. Kasi Bina Potensi Masyarakat

Melakukan bina potensi terhadap masyarakat dalam hal pelanggaran perlindungan masyarakat. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi yang bekerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan bina potensi masyarakat.

c. Kasi Kesiagaan & Penyelamatan

Mempersiapkan teknis penyelenggaraan bina potensi masyarakat. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan bina potensi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

6. Unit Pelaksanaan Satpol PP Kecamatan

Unit pelaksanaan teknis Kecamatan disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung melaksanakan dan melakukan penegakkan Perda.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Wisnu, S.Sos, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.



**Tabel 1**  
**Struktur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Bandar Lampung**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Kepala Satuan	Plt. Drs. Sunardi Syamsi, SE, M.Hum
Sekretaris	Wisnu, S.Sos
Kasubbag Program dan Informasi	Prima Fitriawati, SH
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Drs. Irsyah Hutaparis, MM
Kasubbag Keuangan dan Aset	Usniarti, BBA.
Kabid Perundan-Undangan Daerah	Sofuan, SH
Kasi Pembinaan dan Pengawasan	Agustam, S.Sos
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	Yudi, S.Sos
Kasi Penegakan Hukum	Sayekti Nur Astutu, SH., MH
Kabid Tibum dan Ketentraman Masyarakat	Jan Roma, SE., MM
Kasi Operasi dan Pengendalian	Heliansyah, S.STP
Kasi Kerjasama	Hamdi, S.Sos
Kasi Pengamanan	Asrin, SIP
Kabid Sumber Daya Aparatur	Tarsi Juliawan, S.STP, MM
Kasi Pengembangan Aparatur	Heri Wijaya, SH., MM
Kasi Pemberdayaan Aparatur	Soni Andria Jaya, SE., MM
Kasi Pembinaan, Mental dan Kesejahteraan	Toni Afrizal, S.Sos
Kabid Perlindungan Masyarakat	Drs. Erwan Tavip
Kasi Kesatuan Perlindungan Masyarakat	Zamah Sarif, MH., S.Sos., MM
Kasi Bima Potensi Masyarakat	Iskandar, SE
Kasi Kesiagaan dan Penyelamatan	Herin Susiyani, SH., MH

*Sumber: Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung*

*(struktur terlampir)*

## **B. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan PKL**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Satpol PP dan dua anggota lain. Maka, tugas pokok Pol PP itu untuk menegakkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Walikota dan juga menertibkan ketentraman umum. Dengan kata lain Satpol PP juga bertugas untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada dipasar tengah. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima tidak diperkenankan untuk berdagang atau berjualan di pinggir jalan, diatas trotoar khusus pejalan kaki, dan fasilitas umum lain yang dapat menghambat pengguna jalan lainnya.

Selama ini kami menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Walikota untuk menertibkan pedagang yang berjualan ditempat yang tidak seharusnya. Misalnya berjualan di pinggir jalan, lahan parkir, dan juga trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki dan pengguna jalan yang lain. Adapun lingkup pasar tengah cukup banyak, mulai dari Simpur Center, Jalan Pemuda, Jalan Bengkulu, Jalan Pisang dan beberapa jalan lain. Selain itu saat menjalankan tugas dilapangan Satpol PP sebenarnya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan juga BPLH (untuk mengurus masalah sampah) dalam menertibkan pedagang kaki lima yang ada di pasar tengah. Jika pedagang masih membandel dan tidak menaati aturan. maka kita angkut dan di bawa ke kantor beserta barang dagangannya. Sebenarnya target dari Pak Walikota adalah menjadikan pasar tengah sebagai salah satu tempat untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima. Intinya tugas pol pp itu

untuk penanganan pedagang sekaligus menertibkannya dan bekerja sama dengan instansi-instansi tersebut.

Selain itu, keberadaan pedagang yang sangat banyak di sekitar pasar tengah membuat lahar parkir menjadi sempit dan kendaraan jadi tidak berartutan. Sampah berserakan di sekitar jalan sehingga terlihat kotor. Para pedagang harus membersihkan sampah sisa penjualan karena itu menjadi ciri khas Kota Bandar Lampung yang bersih.

Biasanya yang jadi penghambat utama dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu pertama karena mereka mencari nafkah, yang kedua para pedagangnya nakal atau tidak mau taat aturan. Pedagang-pedagang yang tidak taat aturan ini yang perlu diberi peringatan 1, peringatan 2 dan juga peringatan 3. Masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang seperti ini yang perlu diberikan kesadaran melalui peringatan. Jika peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3 tidak dihiraukan maka yang terakhir akan kita angkut gerobak serta dagangannya. Pak Wali memang sangat menghimbau supaya setiap pasar, khususnya pasar tengah lebih tertib, bersih dan tidak semrawut. Memang kita hambatannya ya itu, kurangnya kesadaran masyarakat atau pedagangnya. Untuk soal tempat, memang mereka tidak ada tempat. Para pedagang kaki lima tidak dikasih tempat untuk berdagang karena di Pasar Tengah terdapat ruko.

Jadi jika mereka ingin berdagang maka mereka harus menyewa ruko yang ada di Pasar Tengah. Para pedagang kaki lima istilahnya adalah pedagang yang berdagang secara dadakan, misalnya datang pagi selesai berjualan sore.

Maka dari itu, tugas polisi pamong praja disini adalah untuk menertibkan situasi keadaan seperti itu.

Untuk penerapan tugas, sudah benar-benar diterapkan secara tegas. Hanya saja para pedagang kaki lima tetap saja berdagang. Tak jarang beberapa pedagang yang hampir rebut dengan anggota dan petugas Satpol PP. Akan tetapi, kami harus tetap menjalankan tugas yang diperintahkan Pak Wali. Sebelum menindak pun, kami sudah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Kami juga harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang memang menetapkan tidak boleh berdagang dipinggir jalan yang berakibat mengganggu para pejalan kaki dan para penegndara yang melintas.<sup>82</sup>

Di dalam pasar tengah ini terdapat macam-macam suku dan juga karakter. Jadi, sebelum diadakan penertiban, maka akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh pedagang, khususnya pedagang kaki lima. Tugas kami disini sesuai dengan acuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang ada. Nah, di dalam Perda tersebut mereka (para pedagang kaki lima) tidak boleh berdagang di lahan parkir, di jalan trotoar, taman kota dan semua fasilitas umum. Di tempat-tempat tersebut memang tidak diperbolehkan untuk berdagang. Intinya tugas Satpol PP untuk menegur secara para pedagang, agar para pedagang dapat berdagang pada tempatnya. Hanya saja yang jadi masalah disini, karena tempat yang kurang memadai, makanya masih banyak saja pedagang yang berdagang di Pasar Tengah, dikiri kanan jalan ataupun di

---

<sup>82</sup> Wisnu, S.Sos, wawancara dengan penulis, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

trotoar masih banyak yang berdagang. Hal itu dikarenakan tempat relokasi atau tempat untuk mereka berdagang tidak ada. Sementara ini jadi kami menegur secara terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan.

Walaupun mereka masih berdagang, paling tidak mereka tidak mengganggu, khususnya untuk pengguna jalan dan juga yang membawa kendaraan roda empat maupun roda dua. Jika ingin tidak benar-benar ada pedagang kaki lima, itu tidak mungkin karena kita tidak ada tempat untuk relokasi para pedagang tersebut. Jadi dihimbaukan kepada para pedagang kaki lima agar mereka berdagang pada tempat yang tidak mengganggu fasilitas umum misalnya, lahan parkir, tempat pejalan kaki, dan terutama untuk pengendara motor dan mobil yang lewat disekitar pasar.

Kemudian untuk hambatan dalam penertiban terdapat banyak hambatan karena menurut kami orang yang berjualan itu halal-halal saja, sebab mereka tidak mencuri. Artinya mereka bukan melakukan hal-hal kriminal atau berbuat kejahatan.

Disini kami hanya ditugaskan untuk bagaimana caranya para pedagang itu tertib. Sampah-sampah dari bekas pedagang itu pun kami selalu ingatkan agar tidak dibiarkan begitu saja atau dibuang sembarangan sehingga mengotori kawasan pasar. Jadi tidak hanya tidak boleh berdagang di trotoar atau dilahan parkir, tapi kebersihan juga harus dijaga. Hal ini selalu diingatkan pada seluruh pedagang terutama pedagang kaki lima. Kalau untuk toko-toko ada aturannya juga, hanya saja itu beda Perda dan beda petugas yang menegur.

Kalau petugas yang dilapangan itu untuk mengatur pedagang kaki lima. Sebenarnya intinya itu agar para pedagang kaki lima tertib dan tidak mengganggu tempat para pejalan kaki, lahan parkir, teras depan toko, dan jalan untuk lewat kendaraan tidak terganggu dan itu menjadi tugas pokok kami disini.

Kami disini tidak boleh kasar terhadap para pedagang atau melakukan tindakan-tindakan yang diluar batas. Pertama pasti melakukan sosialisasi dan jika sudah ditegur tetapi masih susah untuk ditertibkan atau tidak mau mengikuti aturan terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kami. Ada langkah-langkah dari kantor atau sementara barang-barang nya dibawa ke kantor tapi tidak berarti disita oleh petugas. Hanya saja barang-barang dagangan dan alat-alat mereka untuk berdagang akan dibawa petugas. Mereka (para pedagang) akan disidang dalam peradilan cepat. Biasanya ada aturan-aturannya sendiri dan ada bagian-bagian Perda, ada bagian ketertiban umum. Nah, nanti para pedagang kaki lima dibawa ke kantor diingatkan dan dikasih surat perjanjian untuk tidak berdagang ditempat yang tidak boleh dijadikan tempat berjualan seperti trotoar, tempat jalannya kendaraan, lahan parkir ataupun taman kota. Ada sanksi tegas apabila para pedagang masih melanggar dan tetap diingatkan secara tertulis serta diminta untuk berjanji lagi. Biasanya mereka akan mengikuti aturannya.<sup>83</sup>

Jika memang pedagang tidak bisa lagi diingatkan dengan berat hati kami akan membawa mereka sebagai tindakan penertiban. Apapun tugas yang

---

<sup>83</sup> Irfan. Wawancara dengan penulis, markas Satpol PP di Pasar Tengah, Kota Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

diperintahkan oleh Walikota tetap akan dilaksanakan oleh Satpol PP contohnya seperti kebijakan Pak Wali untuk mengatur lalu lintas, untuk Pol PP sendiri itu bukan tugas pokok karena itu dipegang oleh Dishub (Dinas Perhubungan) dan Polantas (Polisi Lalu Lintas). Akan tetapi karena kebijakan Pak Wali, maka Pol PP diperbantukan di lalu lintas untuk membantu mengatur lalu lintas. Hal itu dikarenakan sifatnya penertiban juga, sehingga kami ikut terjun membantu Dishub dan juga Polantas untuk menertibkan jalan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana mengatur dan menertibkan pedagang kaki lima, itu merupakan tugas kami personil atau anggota yang berada di lapangan.

Kami mulai bertugas menjaga dan menertibkan pedagang kaki lima mulai dari pukul 08.00 s/d 16.00. Untuk anggota yang bertugas di pasar tengah jumlahnya lebih banyak dari pasar lain, karena di pasar tengah terdapat banyak pedagang kaki lima.

Berbeda dengan anggota yang bertugas dikantor, mereka bisa saja bertugas sampai pukul 22.00. Apabila keadaan genting maka anggota bisa berjaga selama 24 jam. Untuk jam kerja Pol PP sendiri sebenarnya tidak tentu, jika ada kejadian-kejadian yang mengharuskan turun ya kami turun untuk membantu masyarakat sama seperti aparat-aparat lainnya. Intinya tugas Pol PP yang pokok yaitu untuk penegakkan Peraturan Daerah dan juga menjaga ketertiban umum.

Kami berusaha menjalankan tugas dalam menertibkan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Hal ini dilakukan agar pasar



tengah menjadi lebih rapi dan juga teratur. Jadi para pejalan kaki dan pengguna jalan lain pun tidak akan merasa terganggu. Tidak hanya itu, pasar tengah juga akan terlihat lebih bersih dan tidak sesak oleh para pedagang. Meskipun ada saja pedagang yang masih berdagang dengan berbagai alasan, namun kami tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh Pak Wali dan atasan kami.<sup>84</sup>

Kalau untuk pernah atau tidaknya ditindak sama Pol PP, pasti pernah. Hampir semua pedagang disini, khususnya pedagang kaki lima pasti menjadi incaraan Pol PP untuk ditertibkan. Mereka kan petugas, jadi seringlah kami para pedagang diperintahkan untuk pindah dan tidak berjualan lagi disini. Pol PP saat mengamankan para pedagang terkadang waktunya tidak tentu. Kadang mulai mengamankan dari pagi, siang atau bahkan sehabian. Para pedagang kaki lima disini tidak memiliki surat izin. Akan tetapi kami sebagai pedagang hanya ingin mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Kalau Pol PP memerintahkan untuk pergi dan tidak berjualan lagi, ya kami pergi tapi nanti kembali lagi. Pol PP memerintahkn para pedagang kaki lima untuk pindah dengan alasan agar pasar terlihat lebih rapi dan tidak membuat jalan menjadi macet. Selain itu, Pol PP juga menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh Pemerintah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Walaupun mereka terkadang ada rasa kasihan, tapi mereka harus

---

<sup>84</sup> Irham, wawancara dengan penulis, markas Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, 3 Oktober 2019.

tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Pol PP juga kan mencari nafkah dengan menjalankan tugasnya. Jadi mereka harus taat dengan perintah.<sup>85</sup>

Pol PP hanya menjalankan tugasnya dan menjalankan peran mereka sesuai dengan perintah dan juga peraturan yang berlaku. Mereka sudah menjalankan tugasnya cukup baik, walaupun banyak pedagang yang terkadang masih kurang taat akan aturan. Pol PP juga tidak berani main kasar saat menjalankan tugasnya untuk menertibkan para pedagang disini. Hanya saja mereka menegur dengan cara yang cukup tegas agar pedagang bisa ditertibkan dengan baik.<sup>86</sup>

Untuk masalah penggusuran di Pasar Tengah ini hampir setiap hari diusir oleh para anggota Pol PP. Tugas mereka baik untuk membuat pasar terlihat lebih rapi, hanya saja kami sebagai pedagang ingin mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik karena itu memang tugas mereka. Jadi sebaiknya saling menjaga saja, saat Pol PP menertibkan para pedagang ya kami pergi. Hanya saja kami akan kembali lagi untuk berjualan agar kami tetap bisa mencari nafkah untuk keluarga.<sup>87</sup>

Pol PP hanya menjalankan tugas yang sebagaimana telah mereka terima dari atasannya. Jadi kami tidak bisa menyalahkan Pol PP begitu saja karena itu sudah perintah dan mereka harus menjalankan apa yang telah diperintahkan. Saat menertibkan pun mereka tidak ada yang kasar. Hanya saja

---

<sup>85</sup> Arif, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

<sup>86</sup> Irfan, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

<sup>87</sup> Anto, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

mereka ingin merapikan keadaan pasar sesuai dengan perintah dari Pemerintah.<sup>88</sup>

Hampir setiap pasar pasti sering ditertibkan oleh Pemerintah dengan memerintah Pol PP untuk melakukan tindakan penertiban. Jadi kami sebagai pedagang hanya bisa menuruti apa yang mereka perintahkan. Hanya saja kami akan kesulitan mendapatkan penghasilan jika tidak berdagang. Jadi saat kami diusir dan ditertibkan oleh Pol PP ya kami ikuti, tapi setelah itu ya kami akan kembali berjualan lagi. Kalau pun mau pindah tempat jualan, ya harus pindah kemana lagi. Kami sudah cukup lama berjualan disini, dari jualan ini kami bisa bertahan hidup. Ingin pindah ke tempat lain belum tentu akan mendapat penghasilan rutin setiap harinya. Kalau disini kan, pasti rutin dapat penghasilan walaupun tidak seberapa tapi tetap ada pemasukkan.<sup>89</sup>

Saat ini Pol PP mungkin sedang benar-benar gencar untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tengah. Mereka menjalankan tugas untuk menertibkan para pedagang agar kawasan Pasar Tengah dan sekitarnya menjadi rapi dan tidak macet. Kami sebagai pedagang sangat mengerti akan hal tersebut, tapi mau bagaimana lagi dari berdagang ini kami bisa mendapatkan penghasilan.

Penghasilan yang didapat bukan hanya untuk kebutuhan hidup tapi juga untuk biaya sekolah anak-anak. Supaya anak kami bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi agar kehidupannya jadi lebih baik. Mereka

---

<sup>88</sup> Eva, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

<sup>89</sup> Gustina, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

sudah berperan cukup baik dalam menertibkan pedagang, hanya saja ada beberapa oknum yang sedikit kasar. Mungkin mereka terpaksa melakukannya karena banyak pedagang yang tidak mau ditertibkan dan disuruh untuk pindah.<sup>90</sup>

Sudah sering kami diusir oleh para Pol PP jadi kami sudah terbiasa. Ya mereka memang menjalankan peran dan tugas yang diberikan Pemerintah dengan baik. Hanya saja kita ingin dagang untuk mencari nafkah ya bagaimana. Mereka dan Pemerintah tidak menyediakan tempat untuk kami berdagang. Kalau pun ada, pasti harus bayar sewa dan lain sebagainya. Biaya sewa tempat berdagang seperti ruko begitukan pasti mahal tidak murah. Bahkan mungkin biaya sewanya lebih tinggi daripada penghasilan yang para pedagang dapatkan. Apalagi kami pedagang kaki lima, pendapatannya tidak seberapa dan tidak menentu. Jadi daripada harus sewa ruko yang biayanya mahal, kami lebih memilih untuk jualan dipinggir jalan.<sup>91</sup>

Pol PP menurut saya sudah baik dalam menjalankan tugasnya. Sebelum melakukan penertiban juga mereka selalu memberi himbauan lebih dahulu pada seluruh pedagang. Hanya saja banyak pedagang yang tidak terlalu menggubris himbauan mereka. Sampai akhirnya mereka terpaksa harus melakukan tindakan penertiban pada seluruh pedagang. Akan tetapi kalau kami pergi dari Pasar Tengah, kami harus berjualan dimana.

---

<sup>90</sup> Ida, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

<sup>91</sup> Rini, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Jualan keliling mengangkat atau pun mendorong barang dagangan yang banyak itu tidak mungkin. Jika para pedagang melakukan itu, yang ada hanya kebanyakan berhenti untuk istirahat daripada menjajakan dagangannya. Tempat yang kami lalui pun, belum tentu banyak pembelinya. Kalau disini kan setidaknya barang dagangan kami tetap laku terjual walaupun hanya beberapa. Setidaknya kami mendapat penghasilan hari ini dan bisa diberikan pada keluarga di rumah.<sup>92</sup>

Untuk masalah pernah atau tidaknya diusir Pol PP, jawabannya tentu pernah. Terakhir diusir oleh petugas Pol PP pagi tadi sekitar pukul 10.00-an. Menurut saya Pol PP sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, tapi ya ada juga anggota Pol PP yang agak kasar saat menindak para pedagang.

Tak jarang pedagang dan anggota hampir berkelahi hanya karena pedagang tidak mau ditertibkan oleh petugas. Kami hanya berdagang untuk menyambung hidup, jadi selagi kami tidak berbuat kerusuhan ya sebaiknya tidak perlu ditertibkan. Hanya saja beri kami sedikit ruang untuk tetap berdagang tanpa mengganggu kendaraan atau pejalan kaki yang melintas.<sup>93</sup>

Pol PP hanya menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Pemerintah lebih tepatnya Bapak Walikota. Mereka menjalankan tugas dengan baik walaupun kami sebagai pedagang kadang merasa tidak adil. Kami hanya mencari nafkah kenapa harus diusir dan disuruh pindah dari Pasar Tengah. Kalau kami diusir, gimana nasib dagangan dan juga keluarga kami di rumah.

---

<sup>92</sup> Tuti, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 21 Oktober 2019.

<sup>93</sup> Iwan, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 21 Oktober 2019.

Kami tahu, mereka hanya menjalankan tugas tapi kami disini pun hanya mencari nafkah. Dengan berdagang kami bisa hidup, kalau tidak dagang keluarga mau dikasih makan apa. Lagi pula kami tidak merasa mengganggu, karena tujuan kami disini hanya berdagang untuk mencari nafkah.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para PKL di pasar tengah terpaksa berdagang untuk mendapatkan uang demi keberlangsungan hidup mereka. Para PKL ini pun bukan tidak mau untuk pergi dan mencari tempat berdagang yang lebih layak dan tentunya nyaman. Akan tetapi mereka tidak memiliki uang yang lebih untuk membayar sewa atau ruko untuk dijadikan tempat mereka berdagang. Mahalnya biaya sewa ruko atau toko yang ditawarkan atau mungkin disediakan oleh pemerintah tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan.

Mengenai pendapatan, para PKL ini per harinya hanya mendapat sekitar Rp 200.000,00-Rp 400.000,00,-. Hal ini dikarenakan jenis dagangan yang mereka jual memang memiliki keuntungan yang minim, apalagi di pasar tengah tidak hanya ada satu atau dua PKL yang mungkin menjual dagangan yang sama. Meskipun ada PKL yang penghasilannya mencapai jutaan tapi tetap saja mereka tidak mampu membayar sewa yang telah dibebankan. Pendapatan beberapa PKL serta jenis dagangan yang mereka jual bisa dilihat melalui tabel berikut ini:

---

<sup>94</sup> Ari, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 21 Oktober 2019.

**Tabel II**  
**Nama Pedagang serta Umur, Jenis Dagangan dan Pendapatannya**

<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Jenis Dagangan</b>	<b>Pendapatan/Hari</b>
Arif	25 Tahun	Pedagang Buah Potong	Rp 200.000,00-Rp 300.000,00,-
Ari	28 Tahun	Pedagang Siomay	Rp 300.000,00-Rp 350.000,00,-
Anto	32 Tahun	Pedagang Es Doger	Rp 250.000,00-Rp 350.000,00,-
Eva	32 Tahun	Pedagang Minuman Dingin	Rp 300.000,00-Rp 350.000,00,-
Gustina	40 Tahun	Pedagang Buah-Buahan	Rp 1.500.000,00-Rp 2.000.000,00,-
Ida	24 Tahun	Pedagang Mie Ayam	Rp 200.000,00-Rp 250.000,00,-
Irfan	32 Tahun	Pedagang Bakso Tusuk	Rp 200.000,00-Rp 300.000,00,-
Irwan	27 Tahun	Pedagang Anti Gores	Rp 150.000,00-Rp 250.000,00,-
Rini	24 Tahun	Pedagang Kaos Kaki	Rp 300.000,00-Rp 400.000,00,-
Tuti	23 Tahun	Pedagang Gorengan	Rp 200.000,00-Rp 300.000,00,-

*Sumber: Pedagang Kaki Lima Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung (struktur terlampir)*



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Bandar Lampung**

Dalam menegakkan peraturan mengenai masalah ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, suatu daerah memiliki aparat yang bertugas untuk menjalankan peraturan tersebut agar tercipta lingkungan yang tertib dan juga aman. Seorang pemimpin tentu akan membuat dan memberlakukan peraturan untuk menciptakan Negara yang tertib dan patuh akan hukum. Untuk menjalankan tugas mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum maka Walikota membuat Peraturan Daerah yang mengatur permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan agar daerah tersebut menjadi tertib dan juga tentram. Akan tetapi, Walikota tidak terjun langsung menangani masalah tentang ketertiban umum, melainkan memberikan tugas tersebut pada aparat yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Aparat yang berwenang untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ialah satuan polisi pamog praja atau lebih dikenal dengan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksudkan

dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2). Sejak tahun 1948 Satpol PP mulai menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Kepala Daerah atau lebih dikenal dengan Walikota untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dengan harapan agar masyarakat dapat patuh pada aturan sehingga bisa menciptakan kehidupan yang tentram dan juga tertib.

Satpol PP mengemban tugas yang diberikan oleh pemerintah yaitu Walikota untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib dan taat akan aturan. Tidak hanya itu, Satpol PP juga memiliki tugas, fungsi dan wewenang lain.

Satpol PP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menegakan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan keteriban umum ketentraman; dan
- c. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP sudah melakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan tugasnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Daerah. Selain itu dalam menjalankan tugasnya tentu Satpol PP memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur)

sehingga mereka tidak bisa semena-mena dalam melaksanakan tugasnya. Khususnya dalam menjalankan tugas untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

Dalam menjalankan perannya untuk menertibkan para pedagang kaki lima, mereka akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu sebelum menertibkan para PKL yang ada di Pasar Tengah. Satpol PP akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, tapi jika pedagang masih tidak mau taat aturan maka mereka akan menindak para PKL dengan cara membawa barang dagangan mereka. Namun tidak semua PKL akan mematuhi aturan begitu saja sehingga tak jarang antara anggota Satpol PP dan PKL akan adu argumen. Tak jarang juga Satpol PP akan bertindak kasar seperti memukul atau menyeret PKL yang tidak mau ditertibkan untuk dibawa ke kantor namun masih dalam batas kewajaran. Biasanya yang menjadi faktor penghambat Satpol PP menertibkan PKL adalah karena terbatasnya lahan yang disediakan untuk berdagang, pedagang yang tidak mau patuh akan aturan dan kurang pahamnya pedagang mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya mereka berdagang.

Selain itu, yang menjadi penghambat lain dalam menertibkan para PKL adalah kurang tegasnya sikap Satpol PP dalam menindak para pedagang yang tidak taat akan aturan. Hal ini dikarenakan Satpol PP tidak bisa sepenuhnya untuk melarang para PKL untuk berdagang, sebab dalam Islam berdagang lebih baik daripada harus meminta-minta tanpa melakukan sesuatu pekerjaan atau usaha. Para pedagang pun terpaksa berdagang di tempat yang tidak

diizinkan oleh pemerintah karena mereka tidak mampu untuk membayar biaya sewa lahan atau ruko yang cukup mahal sehingga mereka mencari nafkah ditempat yang tidak seharusnya dijadikan lahan untuk berdagang. Biaya sewa ruko pun terkadang lebih besar daripada pendapatan yang mereka dapatkan perbulannya. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Satpol PP bukannya melarang mereka untuk berdagang, tapi pedagang melakukan pelanggaran yaitu berjualan ditempat yang tidak diizinkan oleh Pemerintah untuk berdagang. Mereka boleh saja berdagang demi mencari nafkah dan keberlangsungan hidup, tapi bukan ditempat yang dilarang oleh Pemerintah.

Para PKL bisa berjualan dirumah atau di tempat-tempat yang memang diizinkan Pemerintah untuk berdagang. Berdagang dirumah atau tempat yang sudah diizinkan tentu akan membuat para PKL lebih merasa nyaman dan aman. Hal ini dikarenakan mereka tidak perlu takut atau khawatir jika sewaktu-waktu aparat Satpol PP melakukan penertiban di pasar. Dengan berdagang di rumah atau di tempat yang semestinya, maka para pedagang sudah menaati peraturan dan taat akan hukum.

Menurut pandangan penulis Satpol PP sudah berperan sangat baik dalam menertibkan pedagang kaki lima. Karena mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hanya saja mereka kurang tegas dalam menindak para pedagang dengan alasan kemanusiaan. Dalam Peraturan Daerah pun sudah sangat jelas menyebutkan bahwa seseorang dilarang berdagang dijalur hijau, lahan parkir,

trottoar dan bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan para pejalan kaki dan pengguna jalan lain (pengendara kendaraan). Jadi jika Satpol PP memberikan tindakan tegas bukan berarti mereka kasar atau bertindak sewenang-wenang pada para pedagang, melainkan mereka hanya menjalankan tugas yang telah dibebankan oleh Walikota dan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Menurut penulis Satpol PP juga kurang berperan dalam memberikan penyuluhan kepada para pedagang kaki lima mengenai aturan berdagang yang baik. Meskipun mereka telah memberikan surat peringatan terlebih dahulu, tapi mereka tidak memberikan penyuluhan kepada para pedagang. Satpol PP hanya memberikan surat peringatan dan segera menindak apabila pedagang tidak mematuhi aturan setelah diberi tiga kali surat peringatan. Jika sebelumnya diberikan penyuluhan terlebih dahulu besar kemungkinan pedagang akan mengerti dan patuh akan aturan yang seharusnya ditegakkan. Dengan memberikan penyuluhan dan juga surat peringatan sebelum menindak para pedagang, pasti para pedagang akan memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini tentu akan membuat Kota Bandar Lampung khususnya Pasar Tengah Tanjung Karang akan terlihat lebih tertib dan juga rapih dari para pedagang yang berdagang disembarang tempat.

**B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung**

Al-Quran dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum pertama dalam agama Islam yang dijadikan Undang-Undang Dasar untuk semua orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Sementara Sunnah atau Hadis dari Nabi Muhammad SAW merupakan dasar atau sumber hukum Islam kedua sesudah Al-Quran. Islam menjalani realita kehidupan dalam menghadapi berbagai masalah selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah atau Hadis serta hukum yang berlaku. Salah satunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengenai tugas, fungsi dan juga wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana peran serta tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP sudah sangat sejalan dengan hukum atau syariat Islam yang mana pada ayat-ayat Al-Quran sudah mengandung petunjuk juga pedoman untuk umat manusia dalam menjalani hidup bermasyarakat dan bernegara diantaranya mengenai penegakkan hukum serta menghindari kemungkaran.

Mengenai peran dari Satpol PP ini terkadang menimbulkan sedikit polemik di kalangan khalayak atau masyarakat Indonesia. Khususnya para pedagang, yang mana salah satu tugas dari Satpol PP adalah menertibkan para pedagang agar menciptakan lingkungan yang bersih, rapih serta teratur. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentaramn Masyarakat dan Ketertiban Umum menyatakan



bahwasanya “*Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota.*” Pada peraturan tersebut sudah sangat jelas terlihat bahwa setiap orang memang dilarang untuk berdagang di tempat yang dilarang oleh Pemerintah. Adanya Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tujuannya adalah agar masyarakat taat dan patuh oleh pertaturan dan hukum yang berlaku. Hal ini tentu bukan semata-mata membatasi hak manusia untuk mencari nafkah demi keberlangsungan hidup.

Akan tetapi agar seluruh warga Negara Indonesia bisa taat dan patuh dengan aturan yang diberlakukan agar dalam hidup bermasyarakat menjadi aman, tentram dan juga damai. Hal ini juga berlaku untuk para pedagang yang ada di Indonesia khususnya para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Penertiban ini dilakukan agar kondisi pasar lebih rapih dan para pengguna jalan tidak merasa terganggu. Dengan taat akan aturan yang telah ditetapkan itu artinya para pedagang sudah membantu para pejabat pemerintah khususnya Satpol PP untuk menjalankan tugas mereka yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam fiqih siyasah sendiri Satpol PP merupakan aparat pelaksana tugas yang diberikan oleh pemimpin atau *ulil amri* yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4] : 59).

Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap manusia harus taat kepada Allah, Rasul serta *ulil amri*. Hal ini bertujuan agar setiap manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidup karena telah mentaati perintah dari Allah SWT, Rasul juga *ulil amri*. Dengan mentaati *ulil amri* itu berarti telah taat dan patuh pada Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk taat pada *ulil amri* pun sudah dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi, umat manusia harus taat dan mematuhi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hal ini sangat penting dilakukan agar terciptanya lingkungan yang tertib dan juga tentram. Jika, kemaslahatan masyarakat sudah tercipta maka dapat dipastikan masyarakat akan hidup tertib, aman dan juga tentram.

Selain itu, *ulil amri* juga menangani urusan-urusan umum seperti, urusan perdagangan, peperangan, pertanian, perdamaian, administrasi, politik dan

perindustrian. *Ulil amri* juga memegang tanggung jawab mengenai urusan-urusan masyarakat yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan mereka.

Dalam fiqh siyasah Satpol PP merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana di dalam *fiqh siyasah* pemimpin disebut dengan *ulil amri*. *Ulil amri* memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, *ulil amri* juga memiliki kekuasaan untuk memerintahkan tugas lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum. Apabila hukum telah terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi sehingga masyarakat akan hidup aman dan damai. Selain itu, terdapat larangan untuk berbuat keji, permusuhan dan melakukan kemunkaran yang berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak manusia dan ketertiban umum serta tegaknya hukum yang berlaku.

Tugas *ulil amri* juga sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dimana manusia dituntut untuk berlaku adil serta menjauhi perbuatan yang munkar. Harus menakar dan menimbang sesuatu secara jujur sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka terhadap orang lain. Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena tugas *amar makruf nahi munkar* merupakan bentuk identitas dari umat Islam sebagai umat terbaik.

Islam sendiri tidak pernah melarang setiap manusia untuk berdagang, karena berdagang bukan merupakan kegiatan yang haram untuk dikerjakan. Hanya saja dalam berdagang tidak diperkenankan untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Jika para pedagang tidak taat akan aturan, maka pemerintah berhak menindak dan mengadili mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi Satpol PP tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang berbahaya atau menyakiti para pedagang kaki lima di pasar. Hal ini juga sejalan dengan kaidah pemerintahan dalam *fiqh siyasah* yaitu الضَّرَرُ يُزَالُ atau yang berbahaya itu dihilangkan. Kaidah ini menunjukkan bahwa manusia harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Dalam menertibkan pedagang kaki lima, Satpol PP sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintahan dalam *fiqh siyasah*. Mereka tidak melakukan kekerasan apalagi sampai memukul para pedagang yang tidak taat akan aturan. Karena pemerintah juga tidak mengizinkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menertibkan pedagang kaki lima.

Selain itu, dalam *fiqh siyasah* juga ada lembaga pengawasan yang bernama *Wilayatul al-Hisbah*. Lembaga ini merupakan lembaga yang mengawasi dan mengadili pelanggaran yang terjadi di pasar. Keberadaan lembaga *Al-Hisbah* tentu memiliki peran yang penting dalam mengawasi segala hal yang dilakukan oleh segolongan umat. Lembaga ini juga menjalankan fungsi pengawasan yaitu *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Dengan adanya lembaga pengawasan ini, maka segala hal yang

mendatangkan kerusakan akan dihindari atau ditutup serta akan mencari segala kemaslahatan umat.

Satpol PP sudah sejalan dengan konsep *fiqh siyasah* karena sejalan dengan *Wilayatul al-Hisbah* atau lembaga pengawasan. Lembaga ini memiliki fungsi untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran ringan yang salah satunya terjadi di pasar. Banyak pedagang yang masih melanggar aturan dan tidak mau patuh akan aturan yang telah ditetapkan. Terkadang PKL hanya berpura-pura menuruti aturan, tapi setelah aparat pergi dan berhenti beroperasi maka pedagang akan kembali berjualan di pasar.

Dalam *fiqh siyasah* pedagang yang tidak taat aturan maka akan diadili oleh lembaga *Al-Hisbah* sedangkan dalam peraturan atau hukum umum yang mengadili dan menindak pedagang yang tidak mentaati aturan adalah Satpol PP. Hal ini membuktikan bahwa peran Satpol PP dalam menangani PKL sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* dan sangat sejalan dengan fungsi dari lembaga *Al-hisbah*.

Jadi, menurut penulis Satpol PP sudah berperan sesuai dengan *fiqh siyasah* karena tugas dan fungsi dari Satpol PP sejalan dengan *ulil amri* dan lembaga *Wilayatul al-Hisbah*. Karena, *ulil amri* merupakan pemegang kekuasaan dalam Islam yang berhak memerintah serta mengutamakan kemaslahatan daripada kemudhorotan. Dimana *ulil amri* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang berperan penting dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada. Sementara *Wilayatul al-Hisbah* adalah lembaga pengawasan yang bertindak untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar.

Agar tidak terjadi kecurangan yang berakibat merugikan orang lain. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP guna untuk menertibkan PKL sudah tepat. Hal tersebut dilakukan karena para PKL telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa mereka dilarang berdagang di kawasan yang memang tidak diizinkan untuk berdagang. Jadi para aparat daerah berhak memberikan tindakan tegas pada PKL yang tidak taat akan aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, tugas dan fungsi Satpol PP sudah sangat sesuai dan sejalan dengan konsep *ulil amri* dan *Wilayatul al-Hisbah*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang berhasil disampaikan di atas, maka yang dapat ditarik kesimpulan adalah:

1. Satpol PP dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 sudah sangat sesuai dengan kedua peraturan tersebut. Meskipun terdapat faktor-faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tetap berusaha untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Walikota. Hal tersebut dilakukan agar keadaan Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung terlihat lebih rapih dan juga bersih. Karena mereka menjalankan tugas sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Walikota untuk menertibkan pedagang kaki lima agar Kota Bandar Lampung khususnya Pasar Tengah Lebih teratur. Selain itu, para pejalan kaki serta pengguna jalan lain khususnya yang membawa kendaraan tentu akan merasa lebih nyaman dan tidak terganggu. Satpol PP juga sudah berperan baik dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak langsung mengusir atau menertibkan para pedagang kaki lima tetapi mereka memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Jika sudah memberikan surat sebanyak tiga kali namun pedagang tetap tidak taat, maka Satpol PP akan menertibkan



mereka dengan membawa barang dagangan ke kantor. Lalu diberi nasihat agar tidak berdagang di Pasar Tengah lagi.

2. Dalam pandangan *fiqh siyasah* peran Satpol PP dalam menertibkan PKL sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu *al- amr bi al- ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain itu, peran dan tugas dari Satpol PP juga sejalan dengan konsep *Wilayatul al-Hisbah*. Dimana lembaga pengawasan ini mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar. Tidak hanya itu lembaga ini pun berhak mengadili dan menindak apabila ada yang melakukan kecurangan atau pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* dan juga tidak melanggar syariat Islam yang berlaku. Satpol PP dalam menertibkan pedagang juga tidak menggunakan kekerasan yang bisa menimbulkan bahaya dan menyakiti orang lain. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah pemerintahan Islam dalam *fiqh siyasah* yakni "*yang berbahaya itu dihilangkan*". Dimana hal-hal yang bisa membahayakan atau menyakiti orang lain itu harus dihindari dan dijauhkan agar bisa mendatangkan kemaslahatan. Jadi, peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah sangat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga sesuai dengan *fiqh siyasah*.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Satpol PP seharusnya tidak hanya memberikan surat peringatan kepada para pedagang kaki lima di Pasar Tengah. Satpol PP seharusnya memberikan penyuluhan dan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang ada di dalam Perda mengenai pedagang kaki lima sehingga para pedagang bisa lebih memahami aturan yang ada. Selain itu Satpol PP juga harus lebih tegas lagi dalam menjalankan perannya agar mereka bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas.
2. Untuk meminimalisir semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Pasar Tengah, sebaiknya pemerintah menyediakan tempat untuk para pedagang agar tetap bisa berdagang. Tempat yang disediakan pun sebaiknya yang biaya sewanya tidak terlalu mahal sehingga pedagang bisa membayar sewa dan bisa berdagang dengan nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993), H. 15
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986.
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Anglo Media, 2004.
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: ITS Press, 2006.
- Bayu Surianingrat, *Pamong Praja Dan Kepala Wilayah*, Jakarta: RinekaCipta, 1990.
- Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016
- Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema,2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah:Ajaran Sejarah Dan Pemikiran J.Sayuti Pulungan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- , *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang: UIN Press, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, Erlangga, 2008.
- Nurhayati, Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pasal 1 ayat (5).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pasal 1 ayat (1).
- Petter Salim, Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern Englis Press.1991.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soetandoyo, Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. (Surabaya: Bayumedia Surabaya.,2008), h. 91.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Susiadai AS, *Metode Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadist Edisi Revisi*, Jakarta Barat: PT BIP, 2013.
- Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru 1991.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Jurnal-Jurnal**

Achmad Safiudin R, *Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol 6, No. 1, April 2016), (On-Line) tersedia di: <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/>, (19 Agustus 2019).

Bintardi Dwi Laksono, *Penegakkan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*, tersesia di : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/>, (19 Agustus 2019).

Eka Novianti Pertiwi, *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Makassar (Studi Kasus Kota Makassar)*, tersedia di: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/>, (19 Agustus 2019).

Gusti Ramanda Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung*, tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/>, (19 Agustus 2019)

Silvia Heppy Octaviani, *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten blitar)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol . 1 No.9, 2013m, tersedia di: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/>, (19 Agustur 2019).

Toha Andiko, *Pemberdayaan Qaw'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Moder*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014, tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32>, (15 Juli 2019).

### **Wawancara**

Anto, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Ari, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 21 Oktober 2019

Arif, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Eva, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Gustina, wawancara dengan penulis, Pasar Tengah Tanjung Karang, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Ida, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Irfan, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Irfan, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Irham, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung, 3 Oktober 2019.

Iwan, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 21 Oktober 2019.

Rini, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

Tuti, wawancara dengan penulis, rekaman, Kota Bandar Lampung 21 Oktober 2019.

Wisnu, S.Sos, wawancara dengan penulis, rekaman, Bandar Lampung 3 Oktober 2019.

#### **Sumber on-line**

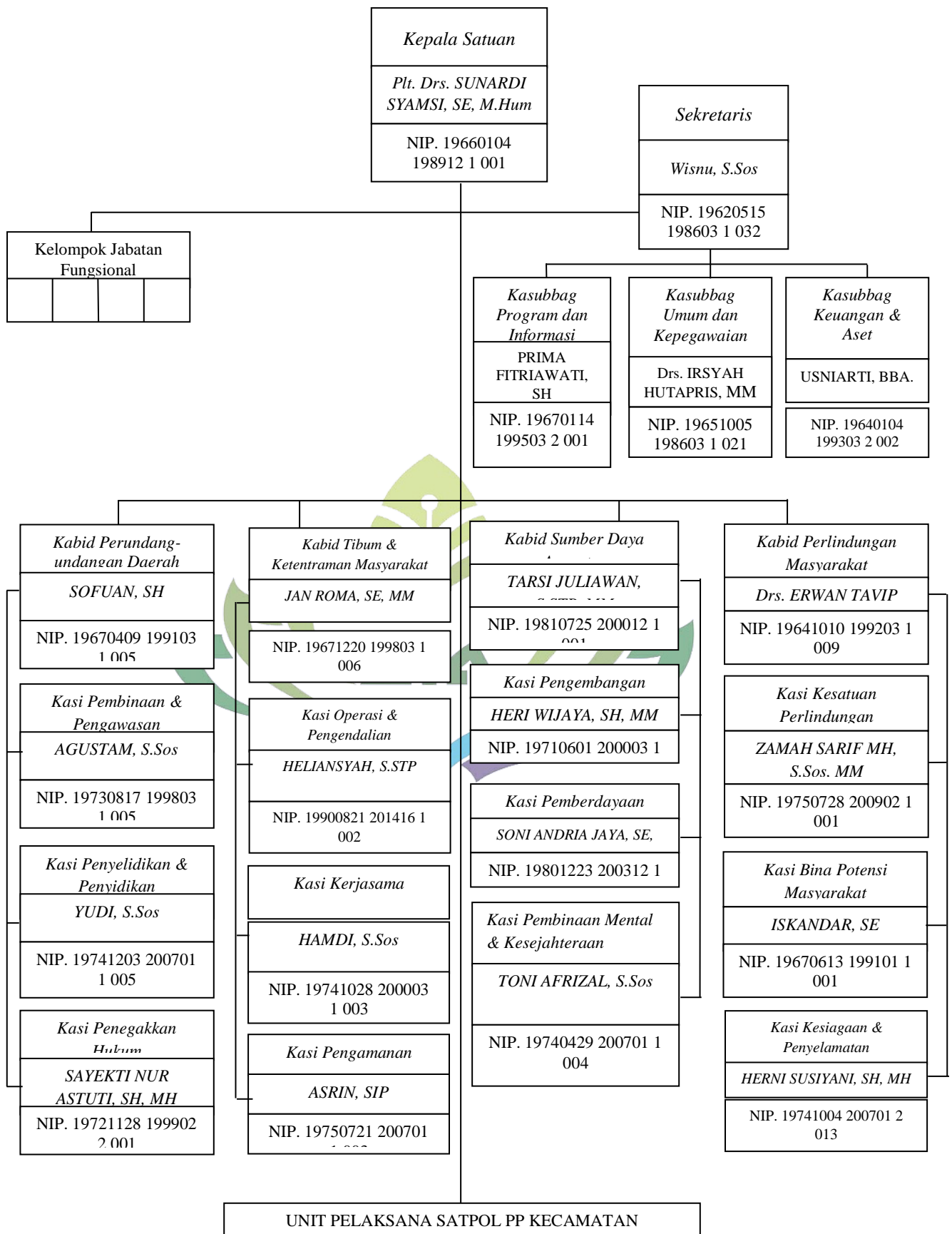
<http://emmyfaryda.blogspot.com/2012/03/ulil-amri-dalam-islam.html>, diakses pada 02 Agustus 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima), diakses pada 20 Agustus 2019.

Yayasan Al-Hisbah Bogor-Indonesia, “Definisi Hisbah” (On-line), tersedia di: <http://www.hisbah.net>, diakses pada 19 Agustus 2019.



## Struktur Organisasi Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 2019





**Tabel II**  
**Nama Pedagang serta Umur, Jenis Dagangan dan Pendapatannya**

<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Jenis Dagangan</b>	<b>Pendapatan/Hari</b>
Arif	25 Tahun	Pedagang Buah Potong	Rp 200.000,00-Rp 300.000,00,-
Ari	28 Tahun	Pedagang Siomay	Rp 300.000,00-Rp 350.000,00,-
Anto	32 Tahun	Pedagang Es Doger	Rp 250.000,00-Rp 350.000,00,-
Eva	32 Tahun	Pedagang Minuman Dingin	Rp 300.000,00-Rp 350.000,00,-
Gustina	40 Tahun	Pedagang Buah-Buahan	Rp 1.500.000,00-Rp 2.000.000,00,-
Ida	24 Tahun	Pedagang Mie Ayam	Rp 200.000,00-Rp 250.000,00,-
Irfan	32 Tahun	Pedagang Bakso Tusuk	Rp 200.000,00-Rp 300.000,00,-
Irwan	27 Tahun	Pedagang Anti Gores	Rp 150.000,00-Rp 250.000,00,-
Rini	24 Tahun	Pedagang Kaos Kaki	Rp 300.000,00-Rp 400.000,00,-
Tuti	23 Tahun	Pedagang Gorengan	Rp 200.000,00-Rp 300.000,00,-

*Sumber: Pedagang Kaki Lima Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

---

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)*  
*703260*

---

Daftar Pertanyaan

- A. Daftar pertanyaan untuk satuan polisi pamong praja kota bandar lampung
1. Mohon bapak jelaskan bagaimana gambaran stuktur organisai satuan polisi pamong praja?
  2. Mohon bapak jelaskan apa saja tugas-tugas satuan polisi pamong praja di setiap divisi/bidang?
  3. Mohon bapak jelaskan bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung?
  4. Mohon bapak jelaskan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menertibkan pedagang kaki lima?
  5. Mohon bapak jelaskan bagaimana cara penertiban pedagang kaki lima di pasar tengah?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

---

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)*  
*703260*

---

B. Daftar pertanyaan untuk narasumber (pedagang)

1. Sudah berapa lama dagang di pasar tengah?
2. Mulai berdagang dari jam berapa sampai jam berapa?
3. Berapa penghasilan per bulan?
4. Kapan terakhir digusur/disuruh pindah oleh Satpol PP?
5. Apakah Satpol PP sudah berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya?
6. Apakah Satpol PP bertindak kasar dalam menertibkan pedagang?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wisnu, S.Sos

Pekerjaan : Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan

Pekerjaan : Anggota Bagian Divisi Tibum dan Ketentraman Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irham

Pekerjaan : Anggota Bagian Divisi Tibum dan Ketentraman Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iiyyah (Hukum Tatanegara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rini

Pekerjaan : Pedagang Kaos Kaki

Umur : 24 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anto

Pekerjaan : Pedagang Es Doger

Umur : 32 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari

Pekerjaan : Pedagang Siomay

Umur : 28 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif

Pekerjaan : Pedagang Buah Potong

Umur : 25 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva

Pekerjaan : Pedagang Pop Ice dan Minuman Dingin

Umur : 32 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gustina

Pekerjaan : Pedagang Buah-Buahan

Umur : 40 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida

Pekerjaan : Pedagang Mie Ayam

Umur : 24 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan

Pekerjaan : Pedagang Bakso Tusuk

Umur : 32 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iwan

Pekerjaan : Pedagang Anti Gores

Umur : 27 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tuti

Pekerjaan : Pedagang Gorengan

Umur : 23 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Desi Tamara

NPM : 1521020204

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Semester : XI (Sembilan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Responden

(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**BLANGKO KONSULTASI**

Nama : Desi Tamara  
NPM : 1521020204  
Jurusan : Siyasah  
Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H, M.H.  
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung  
Karang Kota Bandar Lampung

N O	Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan	
			Pembimbing 1	Pembimbing 2
1	28 Maret 2019	Acc Proposal Pembimbing I		
2	15 April 2019	Konsultasi BAB I dengan Pembimbing II		
3	05 Juli 2019	ACC BAB I dengan Pembimbing II		
4	05 Juli 2019	Konsultasi BAB I dengan Pembimbing I		
5	10 Juli 2019	ACC BAB I dengan Pembimbing I		
	07 Agustus 2019	Konsultasi BAB II dengan Pembimbing II		
6	08 Agustus 2019	ACC BAB II dengan Pembimbing II		
7	09 Agustus 2019	Perbaikan BAB II dengan Pembimbing I		
8	13 Agustus 2019	ACC BAB II dengan Pembimbing I		
9	20 Oktober 2019	Konsultasi BAB III dengan Pembimbing II		
10	22 Oktober 2019	ACC BAB III dengan Pembimbing II		
11	23 Oktober 2019	ACC BAB III dengan Pembimbing I		
12	31 Oktober 2019	Konsultasi BAB IV-V dengan Pembimbing II		

13	1 November 2019	ACC BAB IV-V dengan Pembimbing II		
14	4 November 2019	Konsultasi BAB IV-V dengan Pembimbing I		
15	4 November 2019	ACC BAB IV-V dengan Pembimbing I		

Bandar Lampung, 04 November 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Haryanto H, M.H.**  
**NIP. 195612051983031002**

**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197512302003121002**

